RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TIM PENYUSUN

Pelindung
Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

Pengarah
- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Penanggung Jawab
Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc
(Kepala Bagian Rencana dan Laporan)

Editor
Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT
(Kepala Sub Bagian Penyiapan Rencana dan Program)

Tim Penyusun
Mirza Aditya, Gofar, Alfin Ali, Sarah Alsa, Tri Sudharma, Diete Patik, Mochamad Imron, Koesnobroto, Wahyunengsih, Sinta Agustina, Wulan Sitarahmi, Tursilowulan, Suciati, Elda, Mohammad Hafid, Fajrin, Rohadi, Erik Iswandi, Iwan, Nadiar Chairani Rahamri, Andri Sulistiawan, Saiful Arif Ramadhan, Fusario Yennis, Tunjung

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN
SAMBUTAN
DAFTAR ISI

1.	**Pendahuluan**	**9**
	Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional	10
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	10
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	10
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas	12
2.	**Evaluasi Kegiatan 2014-2017**	**17**
	Lifting Minyak Dan Gas Bumi	18
	Jumlah Penawaran Kontrak Kerja Sama Atau Wk Minyak Dan Gas Bumi	19
	Cadangan Minyak dan Gas Bumi	24
	Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri	26
	Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	27
	Volume Bahan Bakar Bersubsidi	31
	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Subsektor Minyak dan Gas Bumi terhadap Target APBN	32
	Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi	32
	Jumlah Perusahaan Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja (Zero Accident) dan Kegagalan Operasi (Unplanned Shutdown) Fatal	33
3.	**Rencana Kerja Tahunan 2018**	**37**
	Lifting Minyak dan Gas Bumi	40
	Jumlah Penawaran Kontrak Kerja Sama atau WK Minyak dan Gas Bumi	41
	Cadangan Minyak dan Gas Bumi	45
	Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri	46
	Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	46
	Volume Bahan Bakar Subsidi	48
	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Subsektor Minyak dan Gas Bumi terhadap Target APBN	48
	Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi	50
	Jumlah Perusahaan Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja (Zero Accident) dan Kegagalan Operasi (Unplanned Shutdown) Fatal	50
4.	**ANGGARAN DITJEN MIGAS**	**53**
5.	**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**59**
	IKK Direktorat Pembinaan Program	60
	IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	61
	IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	62
	IKK Direktorat Teknik dan Lingkungan	63
	IKK Sekretariat Direktorat Jenderal	64
	IKK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	64

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJMN 2005-2025 11
Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018 11
Gambar 3. Peta Rencana Infrastruktur Migas Nasional 2016-2030 14
Gambar 4. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 19
Gambar 5. Konsep Owner Estimate pada Penawaran WK Tahun 2016 20
Gambar 6. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017 22
Gambar 7. Pohon Industri Petrokimia (Sumber: Petrokimia Gresik) 26
Gambar 8. Persentase Alokasi Gas Bumi Domestik 26
Gambar 9. Lokasi Pembanguan FSRU Banten oleh Pihak Swasta 27
Gambar 10. Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2016 27
Gambar 11. Isu-Isu Strategis Sektor Migas 38
Gambar 12. Sebaran Wilayah Kerja Available dan Terminasi, serta Cekungan Gas Metana Batubara dan Shale Hydrocarbon Indonesia 42
Gambar 13. Sebaran Wilayah Kerja Available dan Terminasi, serta Cekungan Gas Metana Batubara dan Shale Hydrocarbon Indonesia 42
Gambar 14. Alur Proses E-Lelang Blok Migas 43
Gambar 15. Tambahan Insentif Hulu Migas 44
Gambar 16. Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017) 45
Gambar 17. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017) 45
Gambar 18. Perhitungan Konversi Bahan Bakar Bensin ke LPG untuk Nelayan 47
Gambar 19. Proses Penyusunan Anggaran di Kementerian ESDM 55

Grafik 1. Indeks Persaingan Global Indonesia dalam Infrastruktur 13
Grafik 2. Peringkat dan Skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia 13
Grafik 3. Lifting Minyak Bumi Tahun 2013-2017 18
Grafik 4. Lifting Gas Bumi Tahun 2013-2017 18
Grafik 5. Statistik Penawaran WK dan Penandatanganan KKS Migas Konvensional 19
Grafik 6. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatangan KKS 23
Grafik 7. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 24
Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi 24
Grafik 9. Cadangan Gas Bumi Indonesia 25
Grafik 10. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia 25
Grafik 11. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2009-2016 28
Grafik 12. Volume dan Realisasi BBM Subsidi 31
Grafik 13. Volume dan Realisasi LPG Bersubsidi 31
Grafik 14. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2010 – 2017 32
Grafik 15. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas 33
Grafik 16. Jumlah Kecelakaan yang Menyebabkan Kematian 34
Grafik 17. Investasi di Subsektor Migas 50
Grafik 18. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018 54
Grafik 19. Realisasi Anggaran Ditjen Migas 54
Grafik 20. Alokasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar IKU yang dihapus	12
Tabel 2.	Program Infrastruktur Migas dalam RKP 2018	14
Tabel 3.	Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2016	20
Tabel 4.	Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2016	20
Tabel 5.	Terms and Condition Gross Split PSC	22
Tabel 6.	Progress Pembangunan Jargas Tahun 2017	28
Tabel 7.	Lokasi Pembagian Peralatan Konversi Tahun 2016	29
Tabel 8.	Progress Pembagian Paket Konversi BBM ke BBG Tahun 2017	30
Tabel 9.	Capaian Kinerja Tahun 2016	34
Tabel 10.	Capaian Kinerja Tahun 2017	35
Tabel 11.	Sasaran Strategis Ditjen Migas 2017	39
Tabel 12.	Matriks Rencana Aksi Penandatanganan WK Migas Konvensional	41
Tabel 13.	Porsi Belanja Infrastruktur Migas	56
Tabel 14.	Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2	56
Tabel 15.	IKK Direktorat Pembinaan Program	60
Tabel 16.	IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	61
Tabel 17.	IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	62
Tabel 18.	IKK Direktorat Teknik dan Lingkungan	63
Tabel 19.	IKK Sekretariat Direktorat Jenderal	64
Tabel 20.	IKK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	64

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Berdasarkan plat form pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selaras dengan tahapan pembangunan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan tahap ke-III diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
Peran serta sub sektor migas dalam mencapai daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dimana sub sektor migas merupakan penghasil devisa maupun sumber penerimaan negara. Diharapkan penerimaan Negara dari sub sektor migas dapat mencapai Rp. 118,44 Triliun rupiah (APBNP tahun 2017) yang merupakan peneriman terbesar ke dua setelah penerimaan dari sektor perpajakan.
Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Kementerian ESDm c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 yang dijabarkan dalam program penyediaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi yang memiliki 6 sasaran dan 9 Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja Ditjen Migas dalam pencapaian target.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yaitu:

1. Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Grass Root dan RDMP;
2. Rekomendasi Pelaksanaan Subsidi LPG Tabung 3 KG Tepat Sasaran;
3. WK Migas Konvensional yang Ditawarkan;
4. WK Migas Non Konvensional yang Ditawarkan;
5. Draft Revisi Undang-Undang Migas;
6. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
7. Dokumen FS/FEED/DEDC Jaringan Gas Kota;
8. Pipa Transmisi Jaringan Gas Rumah Tangga;
9. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan;
10. Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg.

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat bersatu padu mengembangkan sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah keteknikan.

DR. IR. EGO SYAHRIAL, M. SC

BAB 1

PENDAHULUAN

TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya mengamanatkan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Termasuk didalamnya tertuang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwasasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggarakan negara.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN. RPJMN Tahap I (2004-2009) dan tahap II (2010-2014) telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) sedang dilaksanakan saat ini. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2025) akan disusun sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih (2020-2025). Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan RPJPN 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 dengan visi pembangunan: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Joko Widodo memuat sasaran pokok pembangunan nasional beserta kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengusung agenda tersebut dengan nama “Nawa Cita” sebagai sembilan prioritas pembangunan nasional. Nawa Cita dimulai dari visi Presiden tentang kedaulatan bangsa di sektor politik, ekonomi, dan budaya, yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah, yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara
2. Kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta
3. Intoleransi dan krisis karakter nasional

Salah satu dari 9 Program Nawacita yang mendukung di sektor energi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Nawacita ke-7). Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat

Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJMN 2005-2025

pembangunan jangka menengah tersebut, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada level Kementerian/ Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL).

Sejalan dengan itu, pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa RPJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ABPN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Tema RKP dari tahun 2015 sampai dengan 2018 telah ditetapkan sebagai berikut.

Sebagaimana tercantum pada Gambar 2, pemerintah memiliki fokus kebijakan ke arah investasi dan infrastruktur pada tahun 2018, sehingga program-program pembangunan akan ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut. Di tingkat Eselon I, untuk menjelaskan program yang tertera pada Renstra-KL diperlukan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran tahun ke empat sejak tahun 2015 dengan mempertimbangkan Nawacita, Dekrit Presiden dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2010-2014. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan.

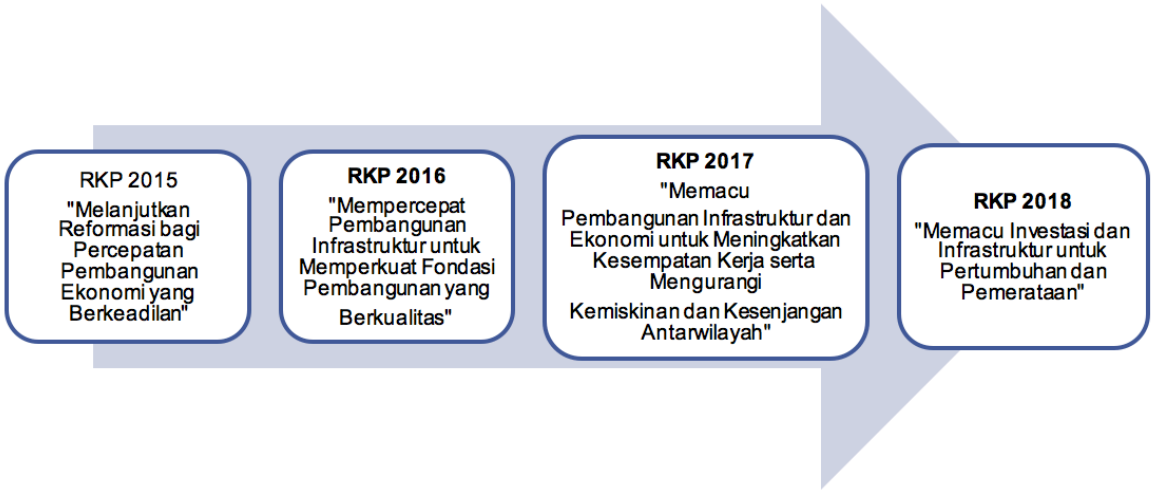

Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

Sejak diberlakukannya Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM, terdapat 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 29 Sub Indikator, ini lebih banyak dibandingkan dengan Kementerian lain seperti Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perhubungan yang jumlahnya dari 6 sampai 21 Indikator. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB didapatkan masukan bahwa IKU Kementerian ESDM terlalu banyak mengingat komoditas yang diatur pada sektor ini sangat beragam. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan penyederhanaan dengan pengelompokan dan mereduksi IKU yang bersifat umum dan administratif dengan tetap berpedoman pada Renstra dan RPJMN yang ada. Dengan begitu pengukuran dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian ESDM lebih mudah dievaluasi khususnya di Direktorat Jenderal Migas yang semula memiliki IKU sebanyak 15 di tahun ini. Maka dengan direvisinya Permen ESDM No. 22 Tahun 2015, IKU Direktorat Jenderal Migas menjadi 9 dan akan diimplementasikan di tahun 2018. IKU inilah yang akan menjadi acuan dalam pencapain kinerja di Direktorat Jenderal Migas di Tahun 2018. Berikut IKU-IKU yang dihapus setelah adanya revisi Permen ESDM ini.

NO	IKU YANG DIHAPUS
1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan subsektor minyak dan gas bumi sesuai program legislasi nasional
2	Kapasitas Kilang BBM :
	a. Produksi Bahan Bakar dari kilang dalam negeri
	b. Kapasitas kilang Bahan Bakar Minyak dalam negeri
3	Kapasitas terpasang Kilang LPG
4	Pembangunan Jaringan Gas Kota:
	a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota
5	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas
6	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

Tabel 1. Daftar IKU yang dihapus

Salah satu tantangan pencapaian pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertera pada RPJMN adalah ketersediaan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. Infrastruktur memainkan peran yang sangat vital bagi pembangunan di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan banyak sasaran strategis pemerintah belum tercapai. Terbatasnya infrastruktur juga turut memberi pengaruh terhadap daya tarik investasi. Alhasil, daya saing Indonesia ikut menurun. Menurut World Economic Forum (WEF), tahun 2016 daya saing Indonesia (Global Competitiveness Index) berada pada peringkat ke-41 dunia atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya pada peringkat 36 dari 140 negara. Sementara tahun 2017 ini peringkat daya saing Indonesia di pasar global meningkat menjadi peringkat ke-31 dari total 137 Negara hal ini disebabkan oleh kondisi makroekonomi Indonesia dan besarnya pasar di dalam negeri. Tahun 2017 secara umum pilar (12 pilar) yang menjadi penilaian mengalami kenaikan peringkat dan ini menjadi salah satu prestasi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan global terhadap makroekonomi Indonesia. Dalam kaitannya terhadap infrastruktur, di tahun 2017 ini yang semula pada tahun 2016 kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 138 negara yang disurvei atau berada pada peringkat ke-4 diantara negara-negara ASEAN mengalami peningkatan menjadi peringkat 52. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya peringkat infrastruktur Indonesia cenderung mengalami perbaikan, pada tahun 2015 di posisi 62 dari 140 negara sebagaimana terlihat pada Grafik.

Grafik 1. Indeks Persaingan Global Indonesia dalam Infrastruktur

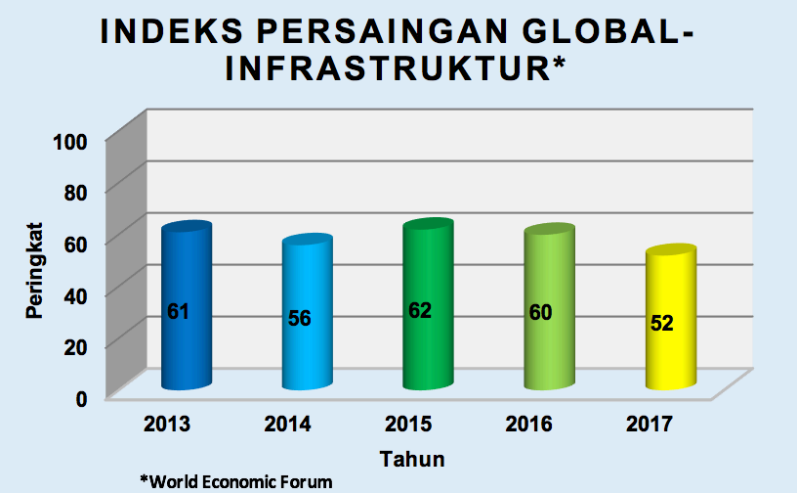

Grafik 2. Peringkat dan Skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia

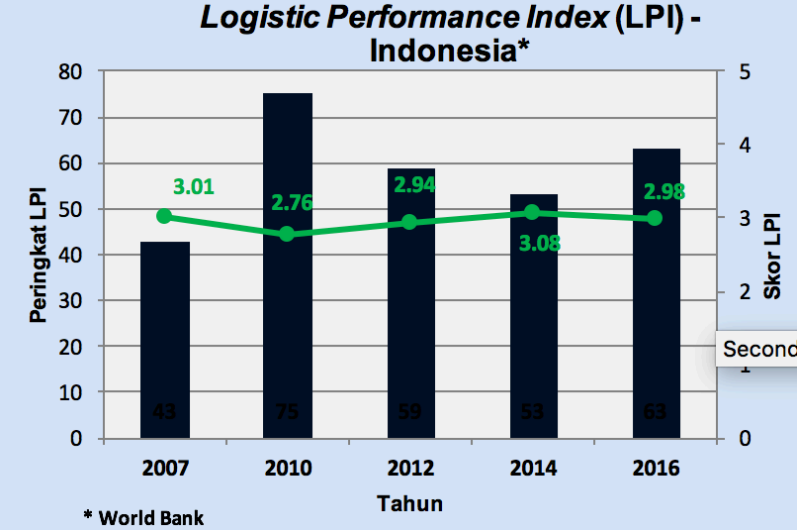

Data Logistics Performance Index (LPI) 2016 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 160 negara dengan skor 2.98 atau turun 10 peringkat dibandingkan pada LPI 2014 (Grafik 2).

Di antara beberapa negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat teratas adalah Singapore yang berada pada posisi 5 kemudian diikuti Malaysia di peringkat 32 , Indonesia di 63. Penurunan skor LPI Indonesia pada tahun 2016 hampir terjadi pada semua indikator, kecuali pada indikator international shipment dan tracking & tracing, berturut-turut mengalami kenaikan skor 0.03 dan 0.08. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah pada kualitas infrastruktur yang mempunyai skor terendah sebesar 2.65. Hal ini menunjukan masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional di seluruh infrastruktur. Berdasarkan fakta tersebut, maka Indonesia perlu pengembangan logistik yang lebih optimal. Secara ringkas, kondisi infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara ditunjukkan pada gambar berikut.

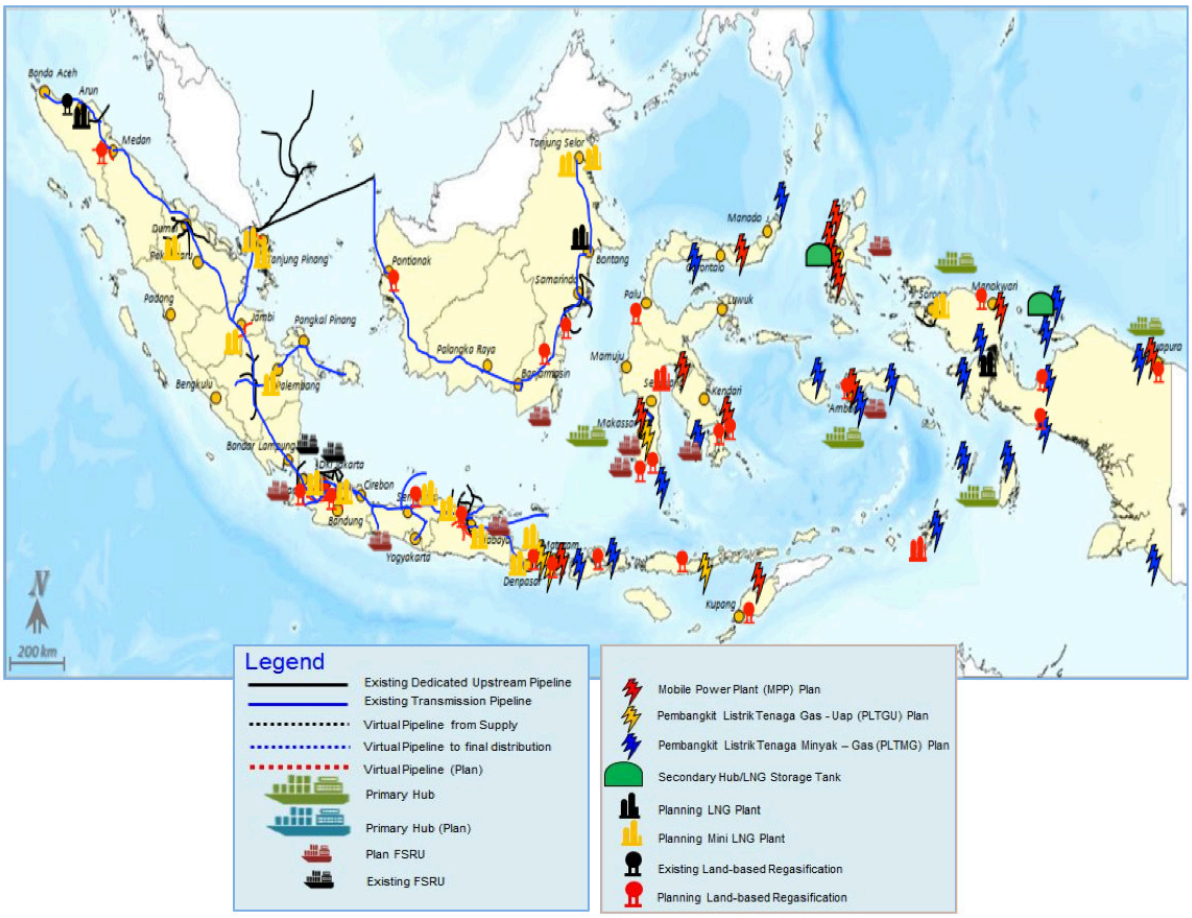

Gambar 3. Peta Rencana Infrastruktur Migas Nasional 2016-2030

Pembangunan infrastruktur yang belum optimal di tanah air tak terlepas dari alokasi dan keterbatasan dana dalam APBN. Hampir setiap tahun, porsi besar APBN dilalokasikan untuk sektor-sektor yang sebenarnya bersifat konsumtif, misalnya subsidi energi. Sayangnya, sebagian subsidi energi tersebut justru salah sasaran. Padahal porsi untuk sektor-sektor konsumtif itu bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif. Salah satunya adalah infrastruktur, dalam konteks ini adalah infrastruktur migas. Program infrastruktur migas yang termuat dalam RKP 2018 seperti terlihat pada Tabel berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Layanan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Grass Root dan RDMP	4 Feed/bfs
2	Rekomendasi Pelaksanaan Subsidi LPG Tabung 3 KG Tepat Sasaran	1 Rekomendasi
3	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	77.880 SR
4	Dokumen FS/FEED/DEDC Jaringan Gas Kota	25FS/FEED/DEDC
5	Pipa Transmisi Jaringan Gas Rumah Tangga	42 Km
6	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	40.000 Unit
7	Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	581.012 Paket

Tabel 2. Program Infrastruktur Migas dalam RKP 2018

Selain pembangunan infrastruktur, program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

1. Percepatan Eksplorasi Migas
2. Peningkatan Produksi dan Lifting Migas
3. Alokasi dan Harga Gas
4. Tata Kelola Gas
5. Pembangunan Kilang
6. Penataan Mekanisme Subsidi BBM dan LPG (BBM 1 Harga dan Pelaksanaan Distribusi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran)
7. Penyelesaian Regulasi di bidang Migas (RUU Migas, RPP Perpajakan Gross Split, RPP Keselamatan Migas)

Seluruh program ini dilaksanakan dengan tujuan agar peranan penting sub sektor migas sebagai penerimaan negara, memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, memenuhi bahan baku industri serta menciptakan efek berantai, dapat terus terjaga serta dapat menunjang semangat Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Guna memelihara momentum pertumbuhan, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi, melalui pemberian insentif fiskal yang lebih baik dan melakukan efisiensi dan efektifitas proses birokrasi untuk meningkatkan pelayanan bagi para pelaku usaha. Keseluruhan program yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran aktif seluruh stakeholders di lingkungan sub sektor migas. Dengan sumber daya alam yang kita miliki, disertai dukungan Peraturan Pemerintah yang jelas dan stabil, izin investasi yang cepat, tidak berbelit dan penegakan hukum, serta pasar yang jelas, diharapkan investasi dari luar negeri akan datang, selanjutnya para investor tersebut dapat terus mengembangkan usahanya di Indonesia.

BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2014-2017

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

a. Volume Lifting Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4 perkembangan lifting minyak bumi dari tahun 2013 sampai dengan terakhir tahun 2017 terus mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan 31 Agustus 2017 realisasi lifting migas mencapai 794 MBOPD dari angka yang di targetkan berdasarkan APBNP 2017 sebesar 815 MBOPD.

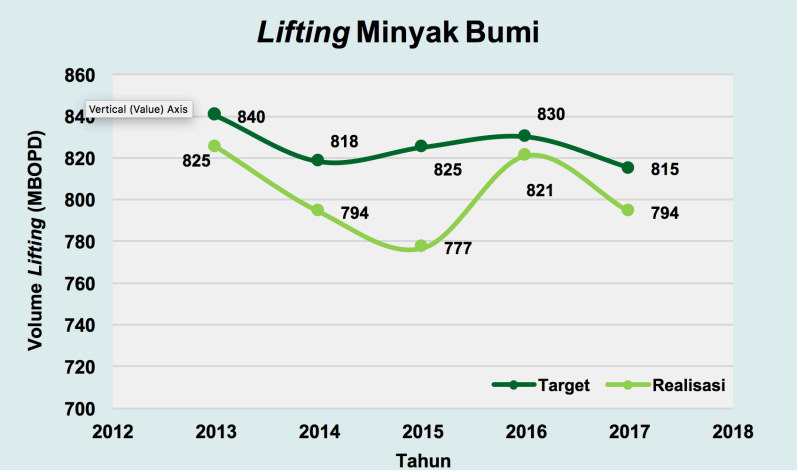

Grafik 3. Lifting Minyak Bumi Tahun 2013-2017

b. Volume Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

Grafik 4 menunjukan perkembangan volume lifting gas bumi selama periode 2013-2017. Tahun 2016 lifting gas bumi sebesar 1.188 MBOEPD. Data sampai dengan 31 Agustus 2017, realisasi lifting gas bumi sebesar 1.134 MBOEPD dengan target yang ditetapkan sesuai APBNP 2017 sebesar 1.150 MBOEPD. Dalam perkembangannya selama 5 tahun terakhir realisasi lifting gas bumi mengalami penurunan karena minimnya penemuan cadangan baru untuk meningkatkan produksi migas.

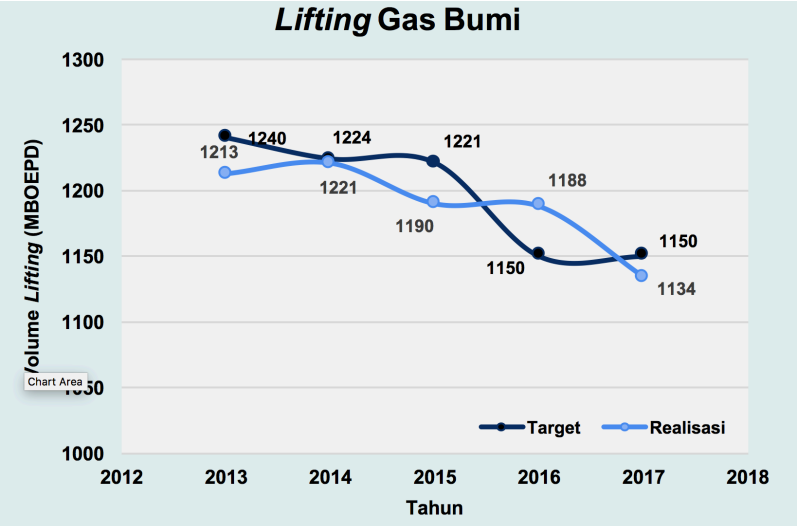

Grafik 4. Lifting Gas Bumi Tahun 2013-2017

JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA ATAU WK MINYAK DAN GAS BUMI

a. Wilayah Kerja Konvensional

Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional melalui lelang wilayah kerja selama periode 2013-2016 mengalami kecenderungan tren menurun sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Penurunan tren tersebut disebabkan oleh semakin terbatasnya prospektif area yang ditawarkan serta kecenderungan penurunan minat investasi perusahaan migas karena harga minyak mentah dunia dan faktor terms & conditions yang diberikan.

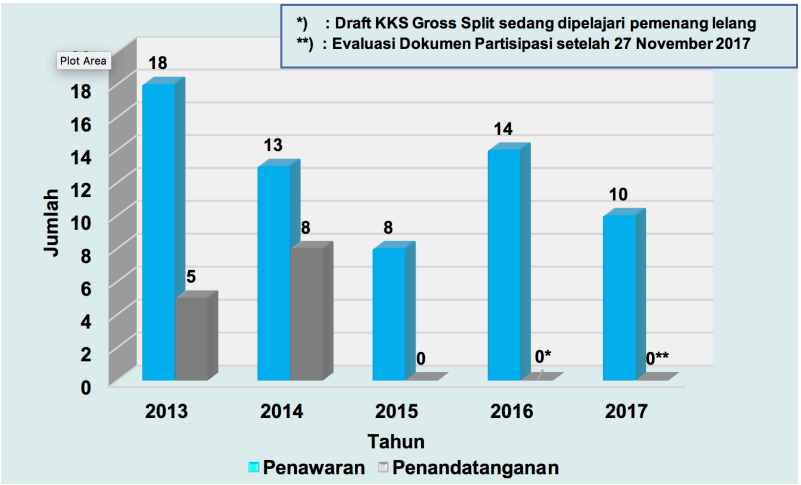

Grafik 5. Statistik Penawaran WK dan Penandatanganan KKS Migas Konvensional

Pada tahun 2016, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan jumlah penawaran sebanyak 14 wilayah kerja yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

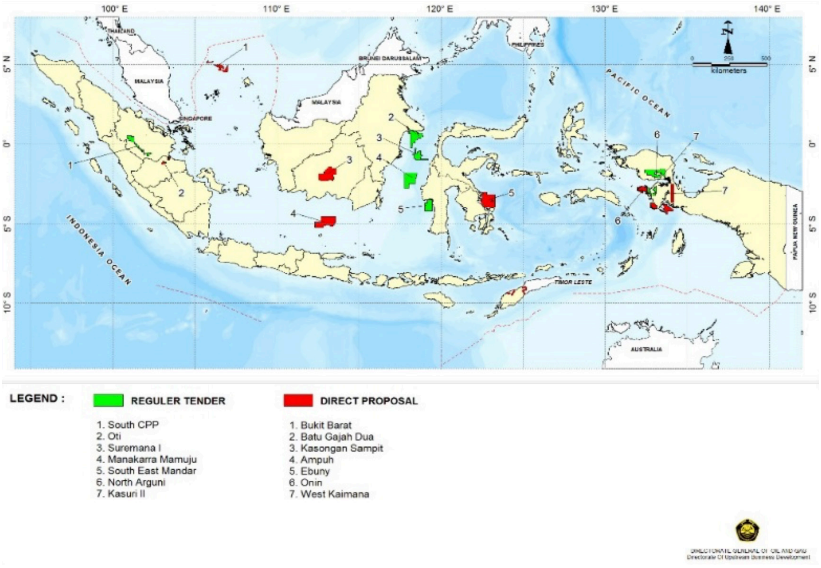

Gambar 4. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016

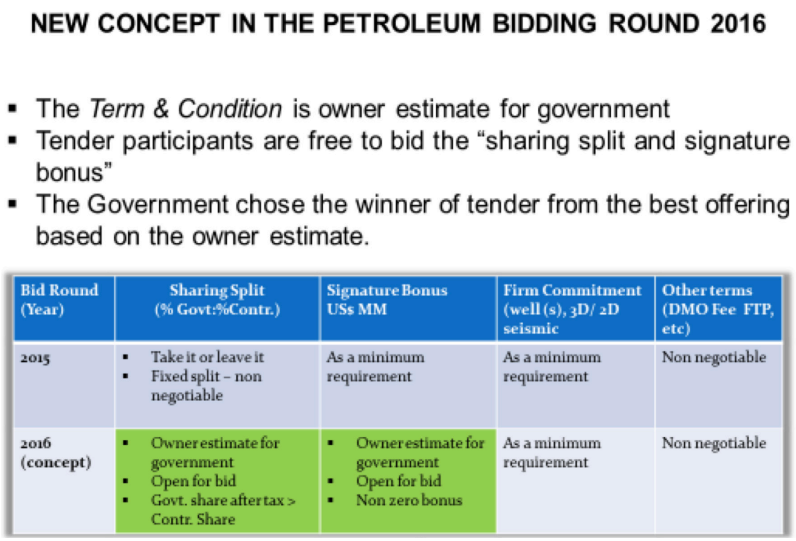

Gambar 5. Konsep Owner Estimate pada Penawaran WK Tahun 2016

Pada penawaran tersebut, Pemerintah berusaha menarik minat investor dengan menawarkan terms & conditions semenarik mungkin dan memperkenalkan konsep baru dalam proses penawaran yang dikenal sebagai owner estimate sebagaimana dijelaskan pada Gambar di atas.

Sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 jumlah Bid Document yang diakses adalah 14 (empat belas) dokumen untuk 6 (enam) Wilayah Kerja, hanya 1 WK yang tidak diakses yaitu WK Ampuh. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2016 ditunjukan pada Tabel berikut.

NO	WILAYAH KERJA,LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1.	WEST KAIMANA,	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran teknis dan bonus memenuhi syarat namun kemampuan keuangan pelaksana studi bersama tidak cukup meyakinkan
2.	EBUNY, Lepas pantai Sulawesi Tenggara	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi syarat & tidak sesuai T&C
3.	ONIN, Daratan-Lepas Pantai Papua Barat	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi syarat & tidak sesuai T&C
4.	BATU GAJAH DUA, Daratan Jambi-Riau	1 calon peserta yang mengakses Bid Document tidak mengajukan penawaran	Tidak Ada	Dokumen Partisipasi tidak lengkap
5.	BUKIT BARAT, Lepas Pantai Natuna	1 calon peserta yang mengakses Bid Document tidak mengajukan penawaran	Tidak Ada	-
6.	KASONGAN SAMPIT, Daratan Kalimantan Tengah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7.	AMPUH, Lepas Pantai Kalimantan Selatan-Tengah	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Tabel 3. Hasil Akhir Penawaran Langsung Tahun 2016

Sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 14 November 2016 jumlah Bid Document yang diakses adalah 5 (lima) dokumen untuk 4 (empat) Wilayah Kerja, yaitu WK Oti, Manakarra Mamuju, North Arguni dan Kasuri II. WK yang tidak diakses adalah WK South CPP, Suremana I dan South East Mandar. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2016 ditunjukan pada Tabel berikut.

Pada tahun 2017, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan jumlah penawaran sebanyak 10 wilayah kerja yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung dan 3 (tiga) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler sebagaimana terlihat pada Gambar 6 berikut:

NO	WILAYAH KERJA, LOKASI	PESERTA LELANG	PEMENANG LELANG	KETERANGAN
1.	OTI, Lepas Pantai Kalimantan Timur	1 Peserta	Azipac Ltd.	• Penawaran memenuhi syarat • Bonus Tanda Tangan US$ 500.000 • Komitmen Pasti: G&G & survei seismik 2D 1.000 km
2.	MANAKARRA MAMUJU, Selat Makassar	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai T&C
3.	KASURI II, Daratan-Lepas Pantai Papua Barat	1 Peserta	Tidak Ada	Penawaran peserta lelang tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai T&C
4.	SOUTH CPP, Daratan Riau	Tidak Ada	Tidak Ada	-
5.	SUREMANA I, Selat Makassar	Tidak Ada	Tidak Ada	-
6.	SOUTH EAST MANDAR, Lepas Pantai Sulawesi Barat-Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7.	NORTH ARGUNI, Daratan Papua Barat	1 calon peserta yang mengakses Bid Document tidak mengajukan penawaran	Tidak Ada	-

Tabel 4. Hasil Akhir Lelang Reguler Tahun 2016

Terdapat 1 WK hasil lelang 2016 yaitu WK Oti dengan pemenang lelang Azipac Ltd, saat ini Azipac Ltd masih mempelajari PSC Gross Split sebelum memutuskan menandatangai KKS tersebut, hal ini dikarenakan pada saat lelang 2016 masih menggunakan skema PSC cost recovery sedangkan pada saat penetapan pemenang, Azipac Ltd diwajibkan menerapkan PSC Gross Split. Berdasarkan Permen Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC Gross Split, Pemerintah telah melakukan amandemen draft PSC WK Oti dan telah disampaikan kembali kepada Azipac Ltd. sebagai pemenang lelang untuk melakukan evaluasi dan perhitungan ulang.

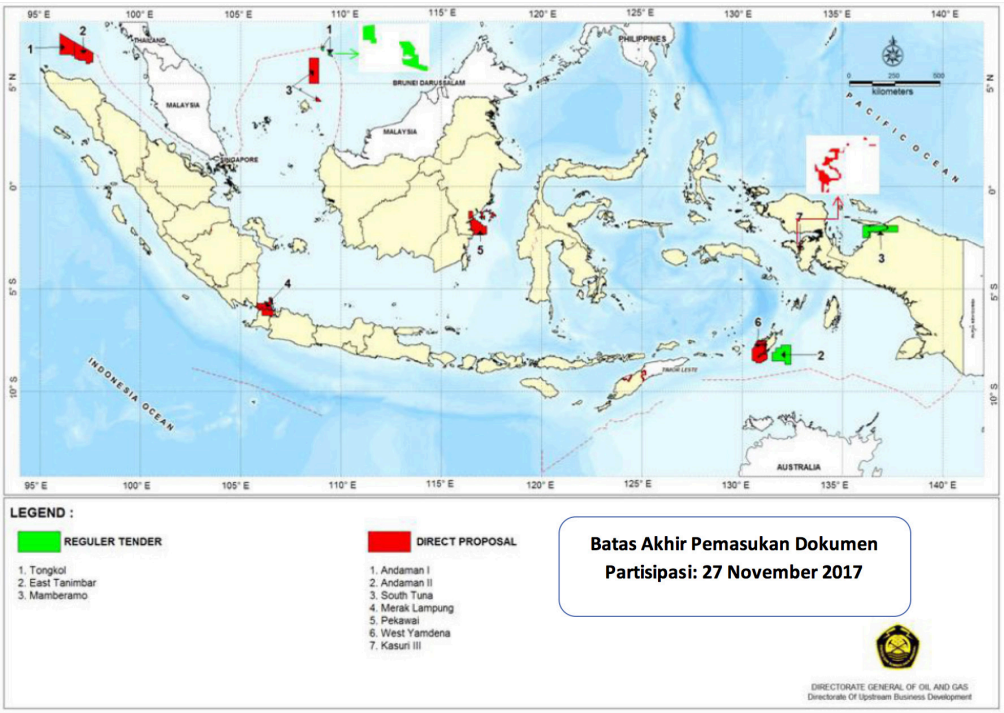

Gambar 6. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil lelang tahun sebelumnya, Pemerintah mencoba menyusun terms & conditions yang lebih menarik untuk WK Migas yang dilelang pada tahun 2017 sehingga dapat menarik minta investor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di Indonesia sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini:

No	Block	Size (km2)	Terms and Condition Gross Split PSC						
			1st Relinquish-ment (%)	Government Base Split (%)		Contractor Base Split (%)		Mini-mum Bonus (US$)	Minimum Fee Commitment
				Oil	Gas	Oil	Gas		
A. Direct Proposal									
1	Andaman I	7346	35	57	52	43	48	750,000	C&G Study and 3D Seismic Survey 500 km2
2	Andaman II	7399.85	35	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 3D Seismic Survey 500 km2
3	South Tuna	7827.09	40	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 2D Seismic Survey 500 km2
4	Merak Lampung	5104.17	25	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 2D Seismic Survey 500 km2
5	Pehawai	7775.83	35	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 1 Exploratory Well
6	West Yamdena	8209.96	40	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 2D Seismic Survey 1000 km2
7	Kasuri III	752.39	5	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 1 Exploratory Well
B. Reguler Tender									
1	Tongkol	583.98	5	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 1 Exploratory Well
2	East Tanimbar	8242.81	40	57	52	43	48	500,000	C&G Study and 2D Seismic Survey 1000 km2
3	Mamberamo	7783	35	57	52	43	48	750,000	C&G Study and 2D Seismic Survey 1000 km2

Tabel 5. Terms and Condition Gross Split PSC

Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017 merupakan penawaran WK dengan penerapan skema PSC Gross Split pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC Gross Split. Dari Tabel 5 terlihat bahwa seluruh WK memiliki bagi hasil (base split) yang sama yaitu 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. Split tersebut dapat disesuaikan terhadap komponen variabel yang ditentukan pada saat pengembangan lapangan serta disesuaikan terhadap komponen progresif yang ditentukan pada masa produksi. Melalui penerapan skema PSC Gross Split diharapkan dapat mendorong kegiatan Eksplorasi dan Produksi lebih efektif dan cepat, mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien, mendorong proses bisnis Kontraktor Hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel, dan mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistim keuangan korporasi bukan sistim keuangan negara.

Dikarenakan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 terbit pada saat Penawaran WK telah diumumkan, Pemerintah memberikan waktu tambahan kepada calon peserta lelang untuk mempelajari konsep PSC Gross Split dan menyampaikan dokumen partisipasi sampai dengan 27 November 2017. Evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk akan dilaksanakan setelah tanggal 27 November 2017.

b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Dalam rangka peningkatan produksi migas jangka panjang maka perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja dan eksplorasi migas secara masif. Hingga tahun 2017 telah ditandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional sebanyak 60 KKS yang terdiri dari 54 KKS Gas Metana Batubara dan 6 KKS Migas Non konvensional (Shale Hydrocarbon).

Salah satu tantangan pengembangan migas non konvensional adalah menurunnya minat Studi Bersama sejak tahun 2012 (Grafik 6) dan terms & conditons yang ditawarkan belum menarik bagi calon investor.

Hal yang perlu menjadi catatan penting yaitu Kontrak Gas Metana Batubara (GMB) pertama kali ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2008 dan Kontrak Migas Non Konvensional (Shale Hydrocarbon) pada 31 Januari 2013 namun hingga saat ini masih perlu upaya yang besar untuk melangkah pada tahap pengembangan dan produksi.

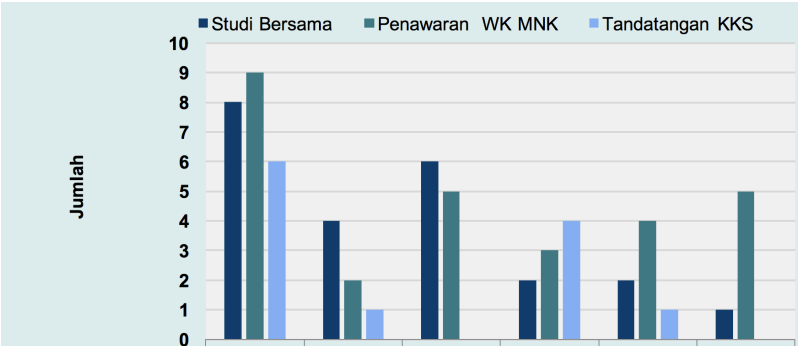

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Studi Bersama	8	4	6	2	2	1
Penawaran WK MNK	9	2	5	3	4	5
Tandatangan KKS	6	1	0	4	1	0

Grafik 6. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatangan KKS

CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

a. Cadangan Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 7, cadangan minyak Indonesia (termasuk kondensat) terus mengalami penurunan seiring dengan minimnya penemuan cadangan baru sampai dengan tahun 2016. Sementara Tahun 2017 tercatat total cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.534 MMSTB dengan jumlah cadangan terbukti sebesar 3.171 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 4.364 MMSTB.

b. Cadangan Gas Bumi

Sebagaimana cadangan minyak bumi, cadangan gas bumi Indonesia pun selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan (Grafik 9). Meskipun pencapaian cadangan gas bumi pada tahun 2017 masih kurang dari target, persentase angka pencapaian cadangan gas bumi masih berada di atas 90% (Grafik 10). Realisasi lebih dari 90 % untuk cadangan gas bumi ini tidak hanya pada tahun 2017 saja, namun itu terjadi di

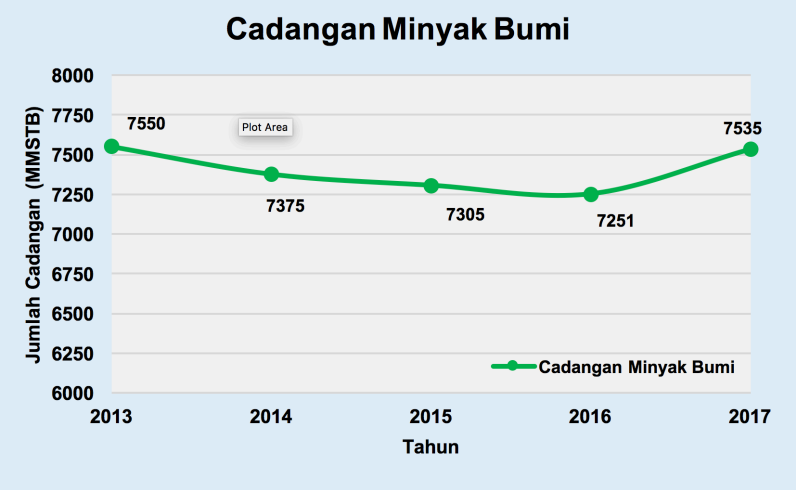

Grafik 7.Cadangan Minyak Bumi Indonesia

Cadangan ini meningkat sampai dengan 284 MMSTB jika dibandingkan dengan tahun 2016. Selama 3 tahun terakhir (Gambar 8), pencapaian realisasi cadangan minyak bumi telah melebihi target. Peningkatan cadangan di tahun 2017 ini disebabkan oleh cadangan kondensat pada Lapangan Abadi.

tahun sebelumnya seperti tahun 2016. Bahkan pada tahun 2015, pencapaian melebihi target 147 TSCF dengan realisasi sebesar 151 TSCF.

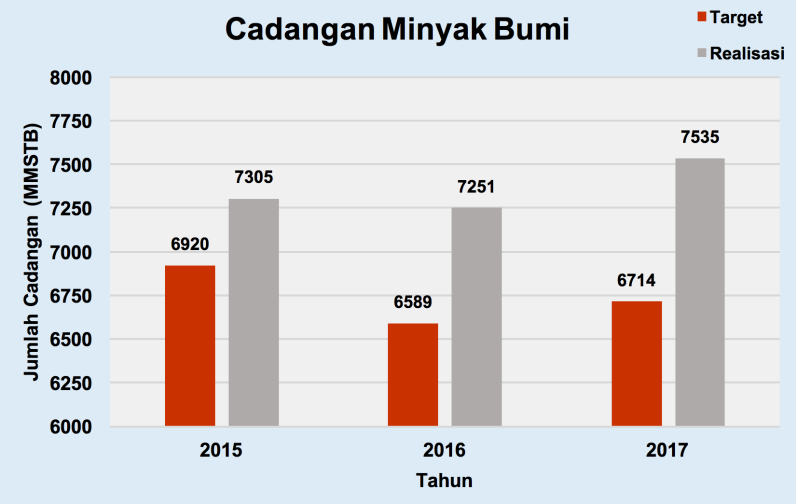

Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi

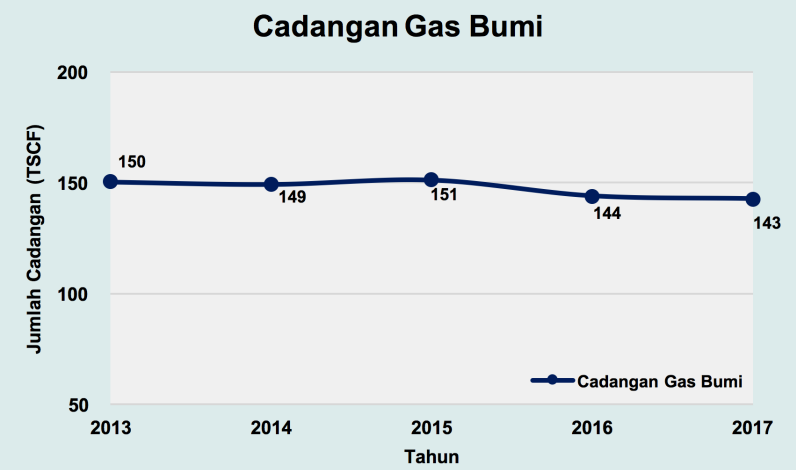

Grafik 9. Cadangan Gas Bumi Indonesia

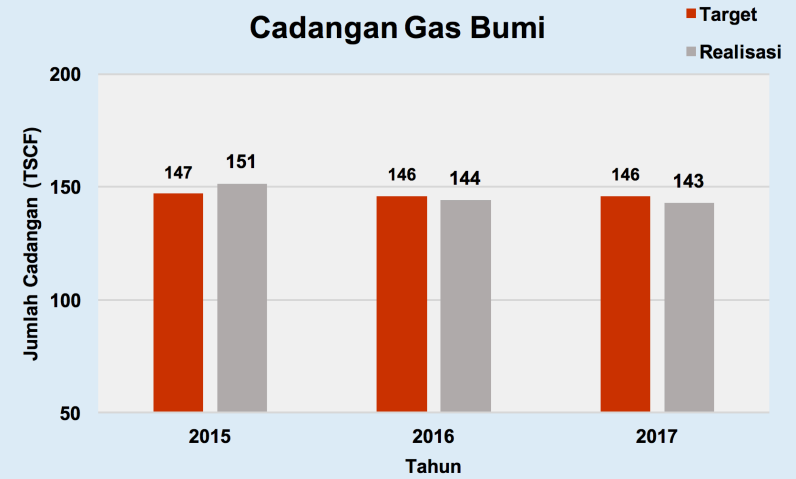

Grafik 10. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia

PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

Persentase Alokasi Gas Domestik

Pemanfaatannya gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), lifting minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga dan transportasi.

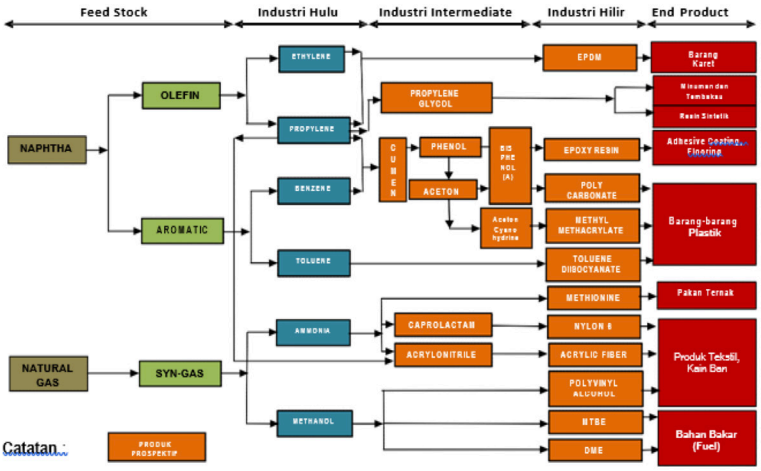

Gambar 7. Pohon Industri Petrokimia (Sumber: Petrokimia Gresik)

Industri gas bumi memiliki kompleksitas yang tinggi, terlihat dari proses produksi, pengangkutan, pemasaran, hingga pemanfaatan gas bumi di tingkat konsumen (Gambar 7). Oleh karena itu pemanfaatan gas bumi tidak hanya memperhatikan alokasi gas buminya saja, tetapi metode pengangkutan dan strategis pemasarannya juga.

Sampai dengan Juni 2017, pemanfaatan gas bumi untuk domestik mengalami peningkatan rata-rata 4-5% sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan di tahun 2017 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 60% lebih penyaluran gas kepada domestik.

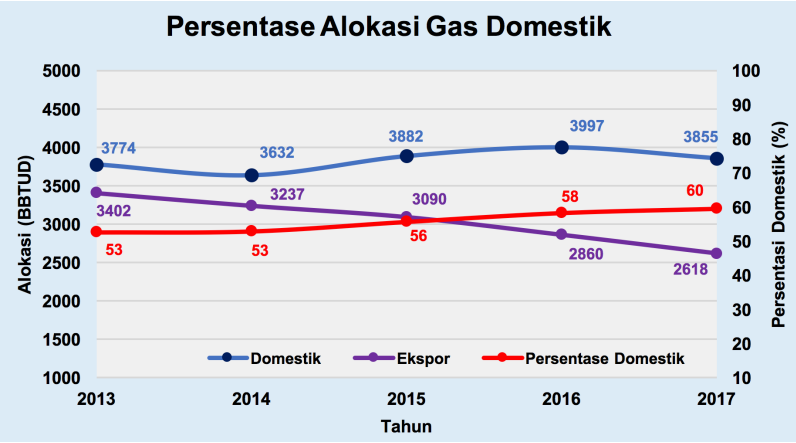

Gambar 8. Persentase Alokasi Gas Bumi Domestik

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

a. Fasilitasi Pembangunan FSRU

Pembangunan fasilitas FSRU Floating Storage & Regasification Unit di Cilegon, Banten oleh pihak swasta merupakan salah satu program/kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional guna mendukung kemandirian energi Nasional. FSRU Banten yang sedang dibangun ini telah diinisiasi semenjak tahun 2011 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2015, namun karena terkendala beberapa faktor teknis dan non-teknis maka jadwal onstream mundur hingga tahun 2017, namun nampaknya di tahun 2017 ini pun belum dapat untuk terealisasikan secara penuh. Fasilitas FSRU Banten terdiri dari kapal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan LNG dan terminal LNG di darat yang berfungsi sebagai fasilitas regasifikasi. Kemajuan proyek pembangunan FSRU ini sampai dengan September 2017 adalah sebesar 54,01 %.

b. Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilanjutkan sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Renstra pembangunan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga tersebut. Kota yang tercantum pada Renstra bersifat fleksible karena memperhitungkan faktor teknis yang baru dapat dipetakan pada saat rapat-rapat koordinasi pencarian pemasok gas.

Berdasarkan kajian perhitungan keekonomian penghematan subsidi BBM melalui pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun 2009, dengan asumsi bahwa kebutuhan minyak tanah rata-rata/orang adalah 4,25 liter; jumlah anggota tiap rumah sebanyak 5 orang; jumlah pelanggan terkonversi pada tahun 2009 adalah sebesar 7.400 Rumah Tangga; Subsidi minyak tanah sebesar Rp. 2.750/liter, maka penghematan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 432,44 juta/bulan atau sebesar Rp. 5.189, 25 juta/tahun.

Gambar 9. Lokasi Pembanguan FSRU Banten oleh Pihak Swasta

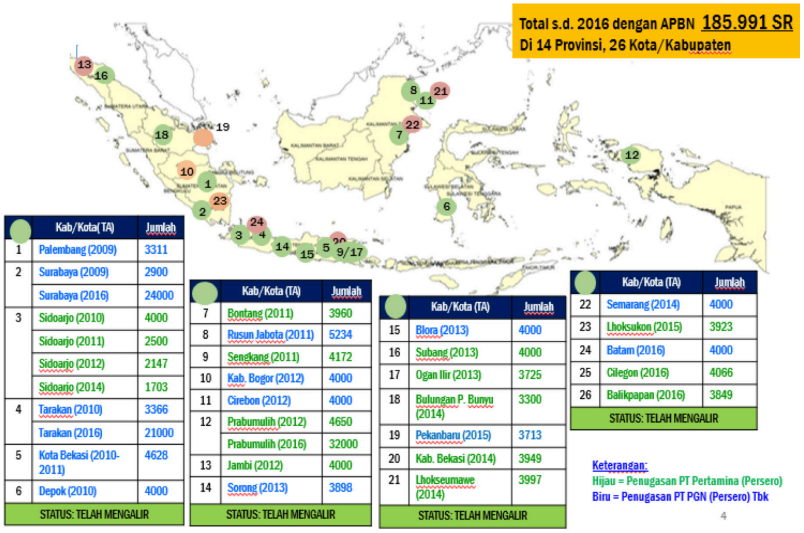

	Kab/Kota(TA)	Jumlah
1	Palembang (2009)	3311
2	Surabaya (2009)	2900
	Surabaya (2016)	24000
3	Sidoarjo (2010)	4000
	Sidoarjo (2011)	2500
	Sidoarjo (2012)	2147
	Sidoarjo (2014)	1703
4	Tarakan (2010)	3366
	Tarakan (2016)	21000
5	Kota Bekasi (2010-2011)	4628
6	Depok (2010)	4000
STATUS: TELAH MENGALIR		

	Kab/Kota (TA)	Jumlah
7	Bontang (2011)	3960
8	Rusun Jabota (2011)	5234
9	Sengkang (2011)	4172
10	Kab. Bogor (2012)	4000
11	Cirebon (2012)	4000
12	Prabumulih (2012)	4650
	Prabumulih (2016)	32000
13	Jambi (2012)	4000
14	Sorong (2013)	3898
STATUS: TELAH MENGALIR		

	Kab/Kota (TA)	Jumlah
15	Blora (2013)	4000
16	Subang (2013)	4000
17	Ogan Ilir (2013)	3725
18	Bulungan P. Bunyu (2014)	3300
19	Pekanbaru (2015)	3713
20	Kab. Bekasi (2014)	3949
21	Lhokseumawe (2014)	3997
STATUS: TELAH MENGALIR		

	Kab/Kota (TA)	Jumlah
22	Semarang (2014)	4000
23	Lhoksukon (2015)	3923
24	Batam (2016)	4000
25	Cilegon (2016)	4066
26	Balikpapan (2016)	3849
STATUS: TELAH MENGALIR		

Gambar 10. Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2016

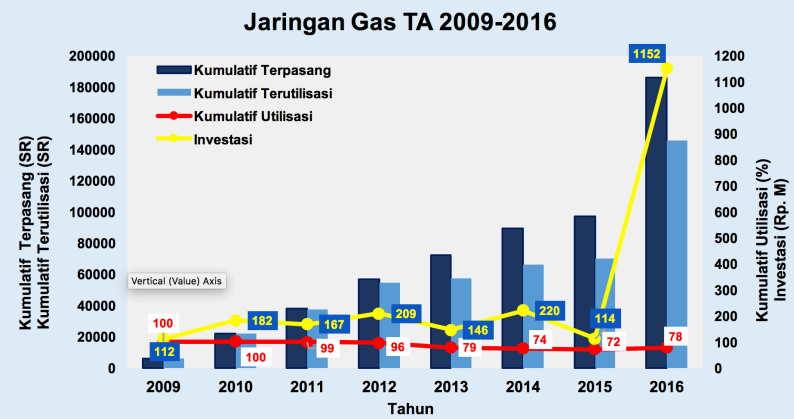

Kumulatif Terpasang (SR)	6.211	22.205	38.071	56.868	72.491	89.440	97.076	18.5991
Kumulatif Terutilisasi (SR)	6.211	22.205	37.687	54.341	57.400	66.245	70.151	14.5577

Grafik 11. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2009-2016

Pembangunan Jaringan pipa gas untuk rumah tangga sampai dengan tahun 2016 sebanyak 185.991 SR yang dibangun di 26 Kota/Kabupaten sebagaiman tertera pada Gambar 10. Sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2016 terus mengalami pengingkatan (Grafik 11).

Pada tahun 2017 kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di 10 lokasi dengan jumlah sambungan sebanyak 59.809 SR. Progres infrastruktur sampai tanggal 14 November 2017 ditunjukan pada Tabel berikut.

c. Konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan kecil

Berdasarkan PERPRES Nomor 126 tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil, Sejak Tahun 2016 kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan dilakukan dengan melakukan pembagian peralatan konversi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nawacita yang mendukung ketahanan energi. Implikasi dengan adanya program ini adalah efisiensi penggunaan energi dan biaya. Tahun 2016 titik lokasi terpilih terdapat di 5 Provinsi yang tersebar di 10 Kab/Kota sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ LOKASI	OUTPUT	PENYEDIA JASA	REALISASI FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
1	Kota Mojokerto	5.000 SR	PT. PGAS Solution	81,77	41,73
2	Kab. Mojokerto	5.101 SR	PT. Patra Badak Arus Solusi	76,19	51,52
3	Rusun PUPR Kemayoran	7.426 SR	PT. PGAS Solution	58,63	20
4	Kota Bandar Lampung	10.321 SR	PT. Nindya Karya	73,82	36,73
5	Kab. Musi Banuasin	6.031 SR	PT. Dhamma Sumber Pundi Artha	72,88	52,89
6	Kota Pekanbaru	3.270 SR	PT. Torindo Utama Sakti	73,32	45,06
7	Kab. Muara Enim	4.785 SR	PT. Noorel Idea	73,11	57,08
8	Kota Bontang	8.000 SR	PT. Torindo Utama Sakti	41,10	25,22
9	Kota Samarinda	4.500 SR	PT. Ilamaru Jaya	49,29	28,22
10	Kab. Pali	5.375 SR	PT. Puncak Mas Utama	48,07	29,73

Tabel 6. Progress Pembangunan Jargas Tahun 2017

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH PAKET
1	DKI Jakarta	Jakarta Utara	154
2	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	785
		Kab. Cirebon	229
		Kab. Bekasi	1100
3	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	902
		Kab. Demak	400
		Kab. Pemalang	48
4	Jawa Timur	Kab. Tuban	330
		Kab. Gresik	900
5	Bali	Kab. Karangasem	625
		T O T A L	5473

Tabel 7. Lokasi Pembagian Peralatan Konversi Tahun 2016

Pada tahun 2017, Dilakukan pembagian Paket Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan sebanyak 17.081 Paket. Progress kegiatan sampai tanggal 6 November 2017 adalah sebagai berikut :

NO	PROPINSI	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PAKET
1	Jawa Tengah	Demak	513
2	Sumatera Barat	Pasaman Barat	898
3	Jawa Timur	Tuban	566
4	Sumatera Barat	Padang (Kota)	525
5	Jawa Timur	Banyuwangi	1.172
6	NTB	Lombok Barat	165
7	Jawa Barat	Sukabumi	639
8	Gorontalo	Gorontalo	418
9	Jawa Timur	Malang	74
10	Sumatera Utara	Labuhan Batu	169
11	Sulawesi Selatan	Jeneponto	371
12	Jawa Timur	Lamongan	279
13	Sumatera Barat	Agam	82
14	Jawa Timur	Probolinggo	345
15	Sulawesi Selatan	Makassar (Kota)	1.375

NO	PROPINSI	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PAKET
16	NTB	Lombok Timur	2.000
17	Bali	Jembrana	1.305
18	Jawa Tengah	Cilacap	2.005
19	Sulawesi Barat	Mamuju	1.240
20	Jawa Timur	Surabaya (Kota)	1.234
21	Sulawesi Selatan	Soppeng	204
22	Jawa Tengah	Jepara	219
23	Sulawesi Selatan	Maros	425
24	Jawa Tengah	Pati	345
25	Jawa Timur	Pasuruan	325
26	Jawa Tengah	Pekalongan	45
27	Jawa Tengah	Pemalang	43
28	Jawa Tengah	Cirebon	100
	JUMLAH TOTAL		17.081

Tabel 8. Progress Pembagian Paket Konversi BBM ke BBG Tahun 2017

d. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan terkait kegiatan ini tertera pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui penugasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penugasan kepada Pertamina dilakukan dengan pertimbangan Pertamina memiliki sumber daya manusia dan rantai distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang akan memudahkan proses pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 realisasi mencapai 776.723 Paket dan 1.117.810 Paket secara nasional. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pembagian. Pada tahun 2017 menargetkan 517.630 Paket dapat tersalurkan, namun Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg ini tidak terlaksana karena anggaran ini termasuk dalam Inpres pemotongan anggaran 2017.

VOLUME BAHAN BAKAR BERSUBSIDI

a. Volume BBM Bersubsidi

Volume subsidi BBM Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 bahwa volume BBM bersubsidi tahun 2015 adalah sebesar 17,9 juta KL. Besaran tersebut menurun dari tahun 2015 dikarenakan mulai tahun 2016 pemerintah menghapus subsidi untuk bahan bakar minyak jenis Premium. Subsidi hanya diberikan untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Sampai dengan 31 Oktober 2017, tercatat realisasi volume BBM Subsidi mencapai 11,26 juta KL dengan target berdasarkan APBNP sebesar 16,61 juta KL. Tren ini konsisten menurun sejak tahun 2013 seperti yang terlihat pada Grafik.

b. Volume LPG Bersubsidi

Volume LPG Bersubsidi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan diterapkannya program diversifikasi BBM ke Gas. Tercatat sampai dengan 31 Oktober 2017 ini realisasi volume LPG Bersubsidi sebesar 5,23 Juta M Ton dari target 7,09 Juta M Ton (APBNP). Target ini meningkat dari tahun 2016 dengan target sebesar 6,25 Juta M Ton sebagaimana pada Grafik berikut:

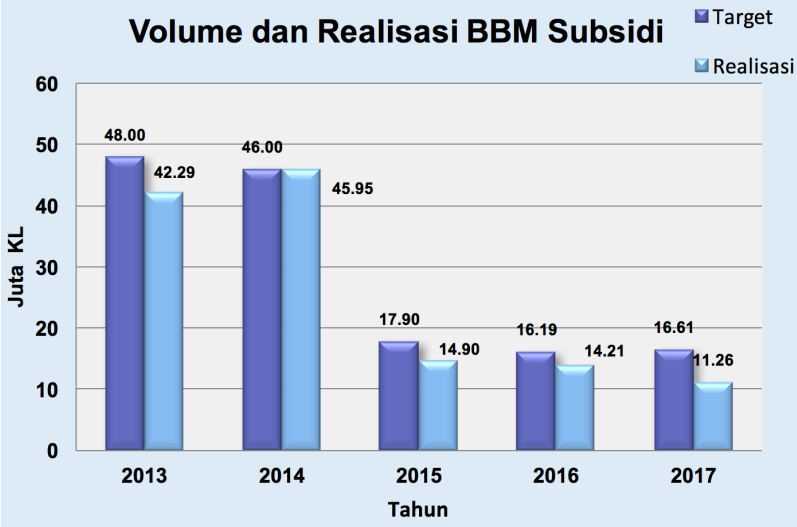

Grafik 12. Volume dan Realisasi BBM Subsidi

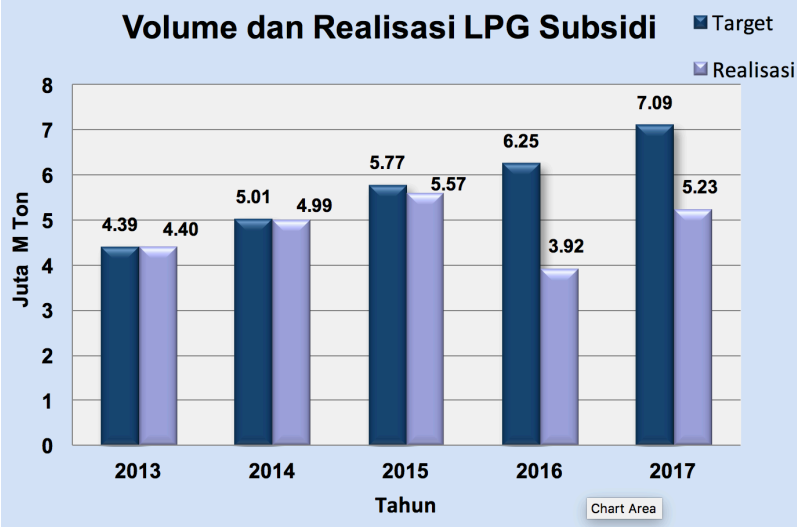

Grafik 13. Volume dan Realisasi LPG Bersubsidi

JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

Dengan realisasi minyak dan gas bumi sampai dengan 31 Agustus 2017 masing-masing 794 MBOPD dan 1.134 MBOEPD beserta harga ICP 48.36 US$/Barrel, maka realisasi penerimaan sampai dengan 31 Agustus 2017 adalah mencapai 92.43 triliun rupiah. Kondisi ini merupakan prestasi karena adanya peningkatan penerimaan dibanding tahun 2016 yang jumlahnya hanya mencapai 83.58 triliun rupiah di tengah dinamika harga minyak dunia dan faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

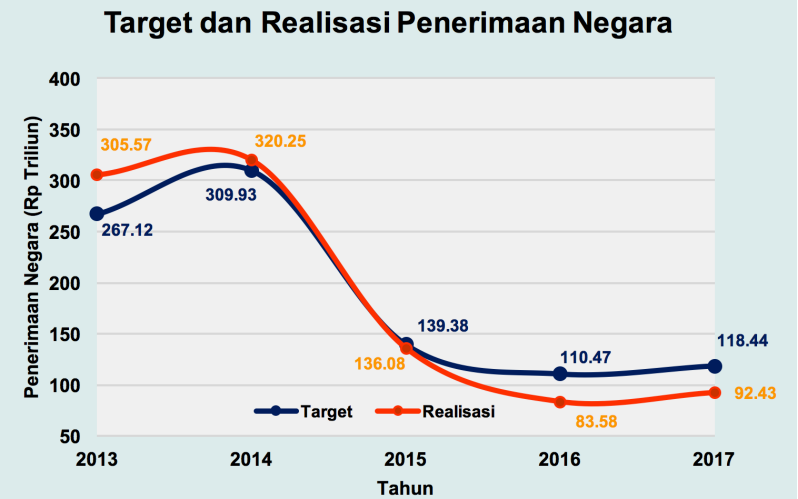

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Negara

INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Realisasi investasi di kegiatan usaha Migas di sampai dengan 20 Oktober 2017 sebesar 7,57 Miliar USD berasal dari sektor hulu sebesar 6,73 Miliar USD nilai tersebut didapat dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi. Di sektor hilir realisasi investasi sampai dengan 20 Oktober 2017, investasi hilir migas mencapai 0,83 Miliar USD.

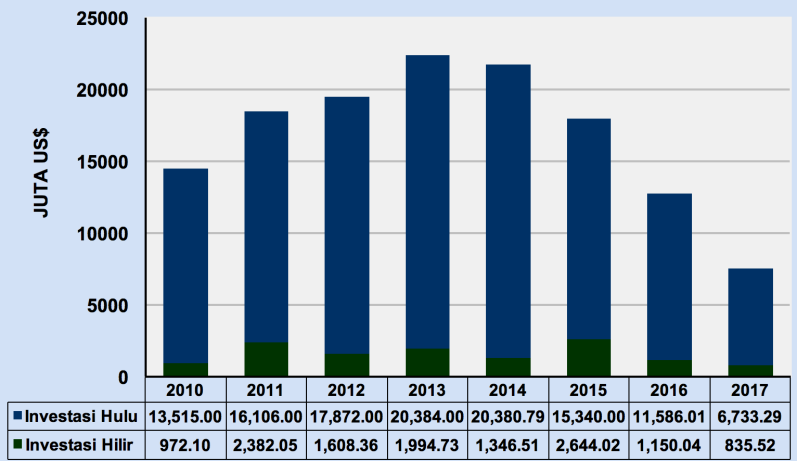

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Investasi Hulu	13,515.00	16,106.00	17,872.00	20,384.00	20,380.79	15,340.00	11,586.01	6,733.29
Investasi Hilir	972.10	2,382.05	1,608.36	1,994.73	1,346.51	2,644.02	1,150.04	835.52

Grafik 14. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2010 – 2017

JUMLAH PERUSAHAAN MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN KERJA (ZERO ACCIDENT) DAN KEGAGALAN OPERASI (UNPLANNED SHUTDOWN) FATAL

a. Hulu

Tercatat sampai dengan 2017 ini jumlah kecelakaan akibat kerja di kegiatan usaha hulu migas dengan kategori fatal sejumlah 4, ini masih bertaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya juga 4. Sedangkan jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal adalah 267 perusahaan. Lebih lengkap selama 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas terlihat pada Grafik berikut.

Usaha Tetap pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dari 100 perusahaan hulu yang melapor setiap bulannya, tidak mengalami kecelakan kerja dalam kegiatan operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada kegiatan usaha hulu perlu diterapkan lebih optimal. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Ini menandakan bahwa Pemerintah cukup berkomitmen dalam mendorong kegiatan usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan.

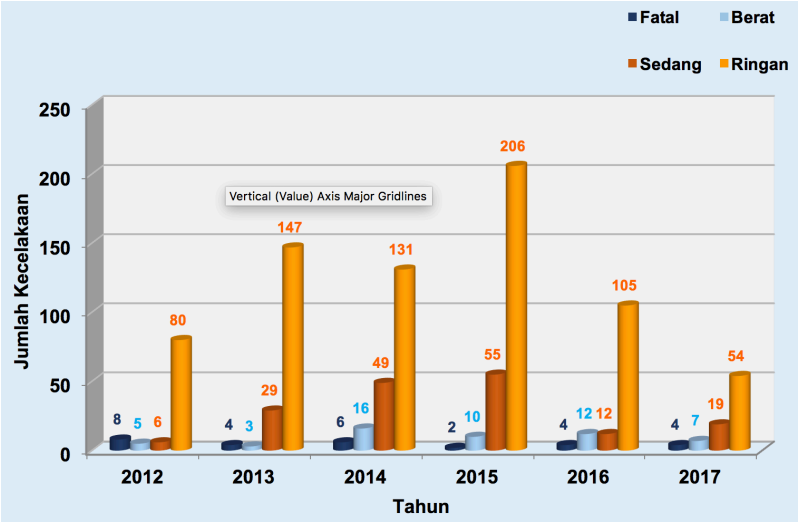

Grafik 15. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Faktor eksternal seperti perubahan harga minyak memberi dampak yang cukup signifikan pada jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas. Hal ini dikarenakan penurunan harga minyak mentah dunia menyebabkan profit perusahaan berkurang sehingga perusahaanperusahaan terkait terpaksa harus menekan biaya operasional. Salah satu biaya operasional yang dikurangi adalah biaya untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, meskipun kegiatan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas senantiasa diperketat oleh Pemerintah, perubahan harga minyak bumi dunia ini cukup berdampak pada kegiatan usaha migas dan performa Badan Usaha dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kecelakaan kerja. Terlepas dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2016, terdapat 89 Badan Usaha atau Bentuk

a. Hilir

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan fatal yaitu sejumlah 6 kejadian yaitu sebagai berikut :

1. Fatality pada Helper Subkon WIKA pada Proyek Pengembangan TBBM yang meninggal Karena tertimpa Pipa 4” di Pulau Sambu pada bulan Juni 2016.
2. Fatality pada sopir mobil tangki yang terjepit diantara dua mobil tangki di TBBM Makassar pada bulan Juni 2016.
3. Ledakan di kapal Tongkang OB Easter 333 milik PT Mitsi Citra Mandiri di Plaju, Palembang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 5 orang luka.
4. Kecelakaan lalu lintas antara truk tangki BBM milik PT Pertamina (Persero) dengan mobil Xenia di Jalan Tol Porong-Sidoarjo dengan 1 korban meninggal.

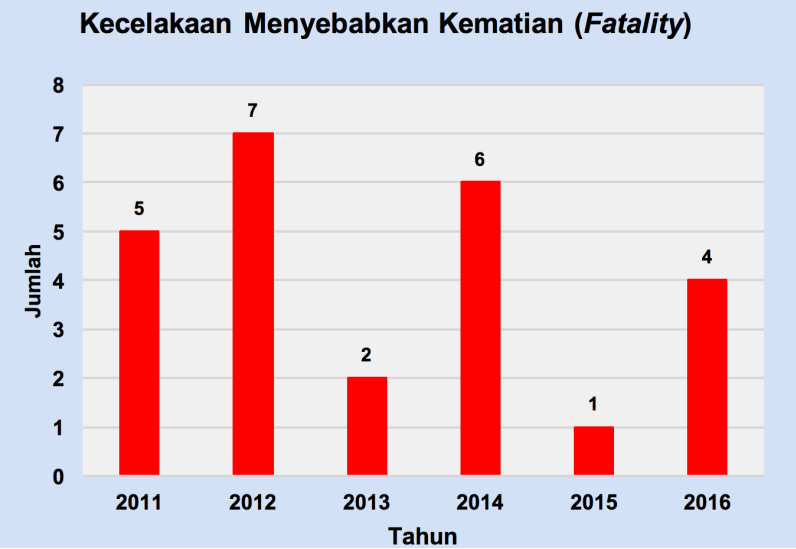

Grafik 16. Jumlah Kecelakaan yang Menyebabkan Kematian

Kenaikan jumlah kecelakan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2016 jumlah pelaporan kejadian kecelakaan migas meningkat. BU/BUT rajin melakukan pelaporan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Ditjen Migas. Upaya-upaya dan strategi tahun 2016 yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidentil ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi;
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat, terutama untuk mengamankan kompetensi tenaga kerja outsourcing dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan tenaga kerja outsourcing;
3. Melaksanakan Forum Komunikasi Migas sebagai wadah pertemuan para pemangku kepentingan di bidang Migas.
4. Membuat edaran tentang keselamatan guna meningkatkan tingkat kewaspadaan para pelaku usaha migas;
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha Migas;
6. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha Migas; dan
7. Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukan-masukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan migas pada Badan Usaha.

Sepanjang tahun 2016, 80 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%. Pada Tabel 9 menampilkan Capaian Kinerja Tahun 2017 sampai dengan November 2017.

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Pengawasan Keselamatan Kegiatan Operasi	Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja	Perusahaan	80	80	100%
Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM)	Kontraktor atau badan usaha yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai > 80	Perusahaan	5	5	100%

Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned shutdown) Hilir	Perusahaan	180	180
2	Perusahaan Hilir yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai diatas 80	Perusahaan	18	-

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, 180 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas pada 2 Badan usaha hilir migas oleh Ditjen Migas dan TIPKM yaitu PT Pertamina RU IV Cilacap dan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV. Dikarenakan keterbatasan anggaran dan terjadi pemotongan anggaran di tengah tahun berjalan, maka Audit SMKM tidak dapat dijalankan sesuai rencana untuk mendapatkan target sesuai IKU tahun 2017. Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Keselamatan Hilir Migas sepanjang tahun 2017 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Simposium K3 Nasional tanggal 21-22 April 2017 di Serpong
2. Peresmian Asosiasi K3 Migas, Sosialisasi Pedoman Pemeriksaan Teknis Operasi dan Instalasi SPBU, dan Bedan Buku Manajemen Keselamatan Proses tanggal 22 April di Serpong
3. Grand Safety Talk RU VI Balongan tanggal 13 April 2017
4. Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 Mei 2017
5. Focus Grup Discussion dan Sosialisasi Permen 38/2017 kepada BU/BUT
6. Forum Komunikasi Keselamatan Migas pada tanggal 29 sd 30 Agustus 2017 di Palembang. Rangkaian acara meliputi Launching Asosiasi K3 Migas, Atlas Keselamatan Migas 2017 dan Malam Penghargaan Keselamatan Migas.
7. FGD SOP Migas Crisis Center tanggal 23 s.d 25 Oktober 2017 yang dilanjutkan dengan simulasi tanggap darurat pada tanggal 21 November 2017 di Jakarta.

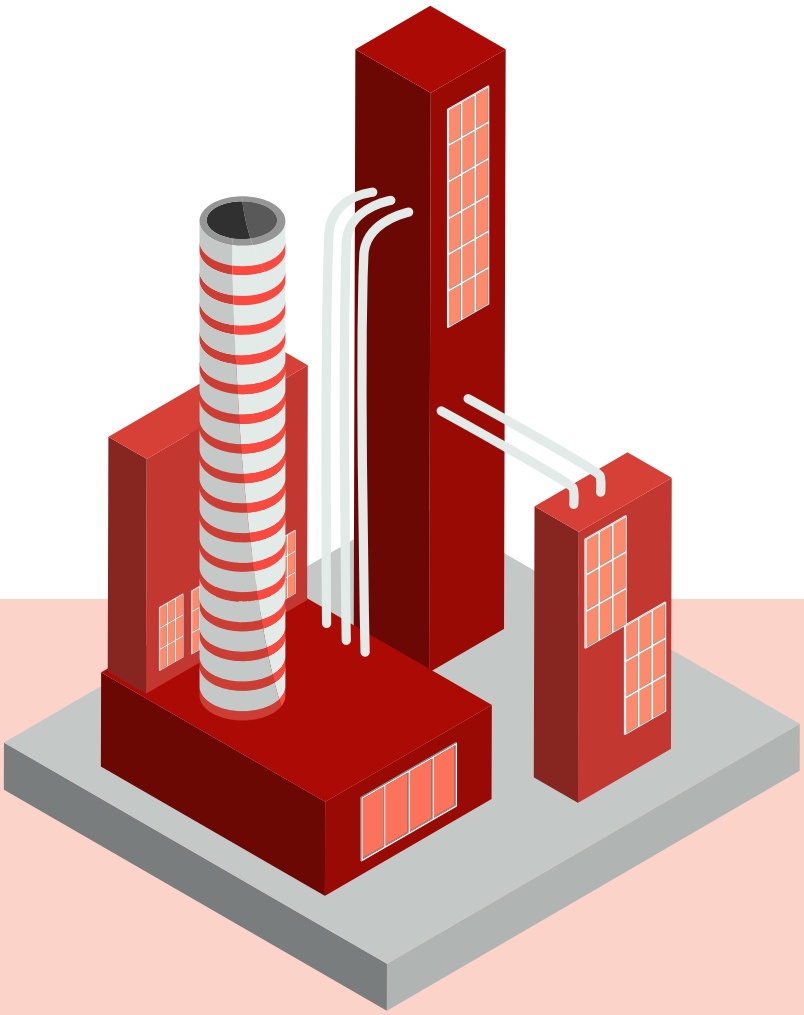

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

RKT 2018 merupakan penjabaran tahun keempat dari RENSTRA Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 dengan mempertimbangkan NAWACITA, DEKRIT PRESIDEN (penugasan) dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA 2010-2014. Ditjen Migas telah menyusun program prioritas sebagai berikut :

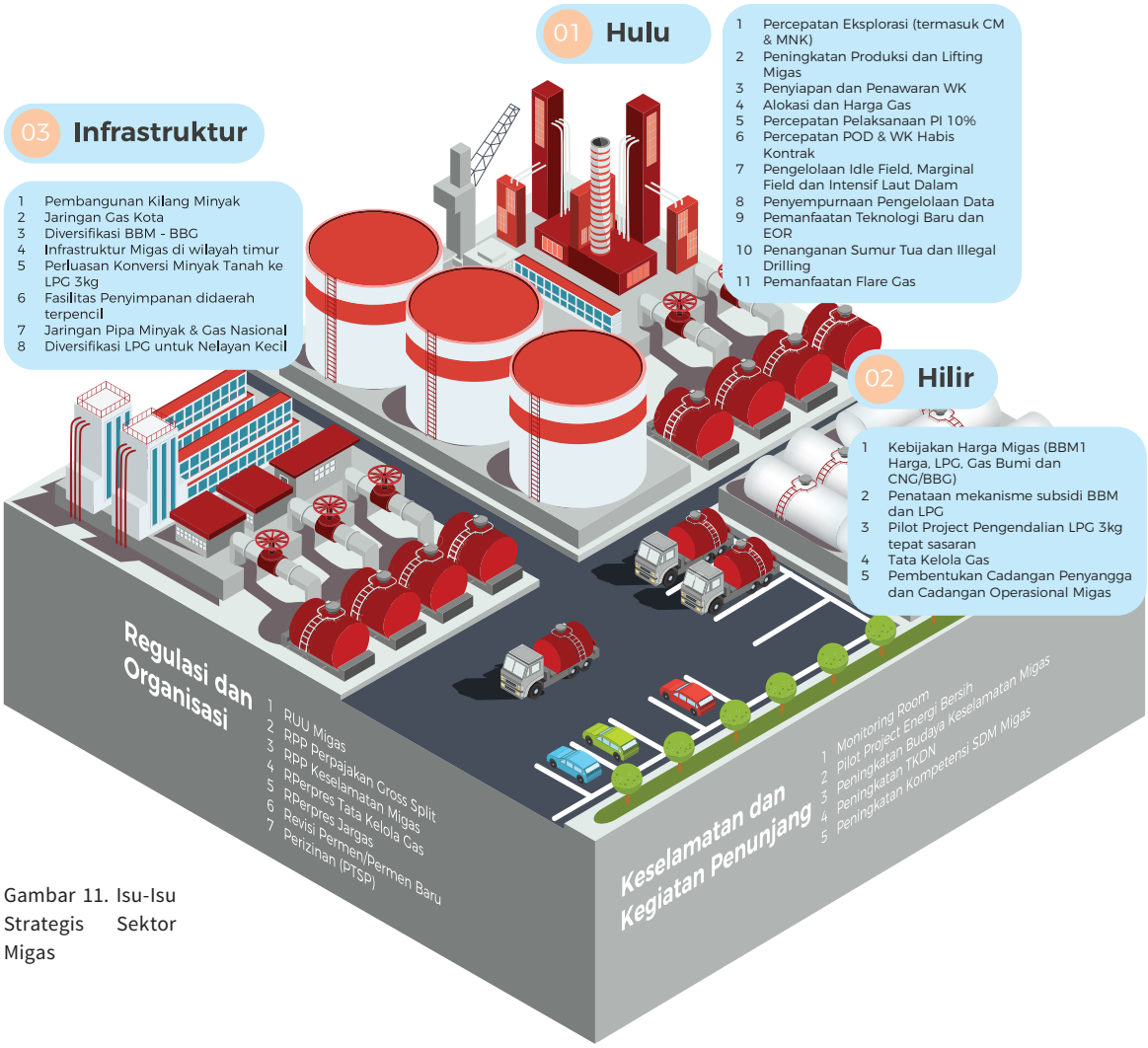

Gambar 11. Isu-Isu Strategis Sektor Migas

Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut diatas, disusun target-target Indikator Kinerja dalam RKT Ditjen Migas Tahun 2018 (usulan revisi IKU Ditjen Migas dalam Permen ESDM No. 22 Tahun 2015) sebagai berikut

Tabel 11. Sasaran Strategis Ditjen Migas 2018

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018
Optimalisasi penyediaan energi fosil	1	Lifting Minyak dan Gas Bumi:		
		A. Lifting minyak bumi	MBOPD	800
		B. Lifting gas bumi	MBOEPD	1200
	2	Jumlah Penawaran Kontrak Kerja Sama atau WK Minyak dan Gas Bumi:		
		A. Konvensional	Kontrak	6
		B. Nonkonvensional	Kontrak	2
	3	Cadangan minyak dan gas bumi:		
		A. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.441
		B. Cadangan gas bumi	TCF	143
Meningkatkan alokasi energi domestik	4	Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri:		
		Persentase alokasi gas domestik	%	63
Meningkatkan akses dan infrastruktur energi	5	Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi :		
		A. Fasilitasi Pembangunan FSRU	Unit	1
		B. Pembangunan jaringan gas rumah tangga	SR	78.315
		C. Konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan kecil	Paket	25.000
		D. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg	Paket	544.409
	6	Volume Bahan Bakar Bersubsidi		
		A. Volume BBM bersubsidi	Juta KL	16,23
		B. Volume LPG bersubsidi	Juta MT	4,66
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral	7	Jumlah Realisasi Penerimaan negara dari subsektor Minyak dan Gas bumi terhadap target APBN	Rp Triliun	118,9
meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral	8	Investasi subsektor minyak dan gas bumi	Miliar US$	15,420
Terwujudnya lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	9	Jumlah perusahaan migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned Shutdown) fatal		
		A. Hulu	Perusahaan	100
		B. Hilir	Perusahaan	200

Keterangan: *) Volume lifting sesuai Nota Keuangan RAPBN 2018

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

a. Volume Lifting Minyak Bumi

Tahun 2018 Ditjen Migas menargetkan volume lifting minyak bumi berdasarkan RAPBN 2018 sebesar 800 MBOPD. Nilai tersebut adalah yang paling realistis mengingat belum signifikannya penemuan cadangan baru. Berikut upaya-upaya strategis untuk meningkatkan Produksi/Lifting Minyak Bumi tahun 2018 :

- Menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian Wilayah Kerja.
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi minyak bumi dengan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Pemantauan produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua
- Melanjutkan monitoring respon tekanan dan produksi dari injeksi air.
- Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting migas serta responsive dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih lahan, pembebasan lahan, serta keamanan.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya.
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan perasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua

b. Volume Lifting Gas Bumi

Tahun 2018 lifting gas bumi ditargetkan sebesar 1.200 MBOEPD berdasarkan RAPBN 2018. Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan optimalisasi Produksi/Lifting Gas Bumi tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih lahan, dan pembebasan lahan, serta keamanan
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan perasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) pada tahun 2018 berdasarkan RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 800 MBOPD, sedangkan produksi gas bumi tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.200 MBOEPD. Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas tersebut, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain :

- Penambahan eksplorasi dalam hal mencari cadangan baru.
- Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover.
- Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru.Monitoring peningkatan produksi dari lapangan Banyu Urip menjadi sebesar 200 ribu MBOPD.
- Percepatan pengembangan struktur idle di PT Pertamina EP.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisiting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perijinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA ATAU WK MINYAK DAN GAS BUMI

a. Wilayah Kerja Konvensional

Pada tahun 2018, target Penandatanganan KKS Migas Konvensional sebanyak 5 KKS, berbeda dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu sebanyak 6 KKS. Penurunan target tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada:
   a. Penurunan kegiatan eksplorasi migas
   b. Penurunan minat keikutsertaan lelang wilayah kerja migas, BU/BUT menunda investasi sampai harga minyak kembali membaik
2. Pengaturan perpajakan bidang migas terkait masa eksplorasi yang kurang menarik
3. Keterbatasan area yang mengandung potensi hidrokarbon
4. Area yang belum optimal dieksplorasi berada di daerah frontier dan laut dalam

Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbarui prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, menyusun regulasi yang dapat menarik minat investasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan penawaran WK Migas, pada tahun 2016 telah dimulai penerapan Penawaran WK Migas melalui elektronik yaitu e-lelang yang saat ini diterapkan mulai dari Pengumuman s.d. Forum Klarifikasi. Terkait dengan regulasi, saat ini Ditjen Migas merencanakan untuk revisi Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran WK Migas.

Selain itu, dengan telah diterbitkannya Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas telah melakukan penyederhanaan perizinan menjadi 6 jenis perizinan, salah satunya Izin Survei Umum Migas. Penyederhanaan perizinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat badan usaha untuk melaksanakan survei umum yang nantinya data yang didapat dari kegiatan survei umum tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi potensi hidrokarbon dalam rangka penyiapan calon wilayah kerja.

Untuk menunjang pencapaian target Penandatanganan KKS Migas Konvensional Tahun 2018, Ditjen Migas mengusulkan kegiatan dengan 2 output yaitu Layanan Penawaran Kontrak Kerja Sama Migas dan Penetapan Hasil Lelang WK Migas Konvensional serta WK Migas Konvensional yang ditawarkan, dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2018	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penandatanganan KKS Migas Konvensional	KKS	5	• Konsulda • Pembahasan T&C • Pembahasan draft KKS	• Konsulda • Pembahasan T&C • Penetapan T&C • Implementasi draft KKS • Pengumuman lelang	• Konsulda • Pembahasan T&C • Penetapan T&C • Implementasi draft KKS • Pengumuman lelang	• Penetapan T&C • Pengumuman lelang • Proses lelang Evaluasi participation document

Tabel 12. Matriks Rencana Aksi Penandatanganan WK Migas Konvensional

b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Di tengah iklim investasi di bidang minyak dan gas bumi yang semakin menurun, dalam pengembangan wilayah kerja migas non konvensional akan dilakukan penyempurnaan baik dalam penyiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga terms & conditions dan bentuk kontrak yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dari upaya tersebut dapat membantu pencapaian target berupa penandatanganan 2 (dua) KKS Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

Secara umum, Strategi Pencapaian Target Penandatanganan 2 (dua) Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional tahun 2018, antara lain:

1. Penyiapan Wilayah Kerja

a. Meningkatkan pelayanan perizinan Studi Bersama dan Evaluasi Bersama

Mengingat minat investasi pada Shale Hydrocarbon dan Wilayah Kerja GMB yang ada saat ini sebagian besar melalui proses partisipasi Lelang Penawaran Langsung, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan izin Studi Bersama dan Evaluasi Bersama dalam mengevaluasi dan interpretasi potensi migas non konvensional pada suatu area usulan.

Terus berkurangnya jumlah aplikasi dan permohonan persetujuan Studi Bersama dari calon investor terutama terhadap migas non konvensional harus menjadi pengingat dan motivas untuk lebih memperbaiki proses perizinan.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut (Permen ESDM No. 36 tahun 2008 dan No. 05 Tahun 2012) telah berjalan dan melibatkan partisipasi stakeholder, sehingga hasil yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi. Sebagai contoh, berkurangnya nominal jaminan Studi Bersama, SOP Pengajuan Studi Bersama yang lebih terkontrol secara waktu dan dapat dilakukan melalui elektronik online, pengutamaan bagi pelaksana Studi Bersama dalam proses Penawaran Langsung, dan proses e-lelang WK Migas.

b. Kerjasama Ditjen Migas, Badan Geologi, Badan Litbang, Pusdatin dan SKK Migas dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Migas :

Dalam penawaran wilayah kerja melalui Lelang Reguler, perlu dilakukan kerja sama Trilateral (Ditjen Migas, Badan Geologi, Badan Litbang) dan didukung oleh Pusdatin dan SKK Migas untuk mengevaluasi potensi migas non konvensional yang areanya bersumber dari :

a. Wilayah Kerja Terminasi

Hingga tengah tahun 2017, terdapat 6 (enam) Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang telah terminasi. Hal ini menjadi peluang bagi investor lain untuk dapat mengelola area tersebut. Namun demikian, perlu bagi Pemerintah untuk meningkatkan data dan hasil interpretasi potensi gas metana batubara pada wilayah tersebut dengan menggunakan data baru hasil eksplorasi Kontraktor sebelumnya dan penambahan data lain yang diperlukan.

b. Wilayah Kerja Available

Terdapat 11 Wilayah Kerja Available yang terdiri dari 5 Wilayah Kerja Available Gas Metana Batubara dan 6 untuk Shale Hydrocarbon. Ke-11 Wilayah Kerja Available yang pernah ditawarkan melalui lelang ini perlu dilakukan peningkatan mutu data supaya interpretasi potensi yang dihasilkan lebih akurat dan meyakinkan bagi calon investor. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Badan Geologi dan Badan Litbang dalam melakukan review dan penambahan data berupa sampling, coring, maupun survei geofisika.

c. Wilayah Terbuka

Saat ini Indonesia memiliki 11 cekungan yang potensi akan kandungan Gas Metana Batubara yang sebagian besar terletak di Sumatera dan Kalimantan (Advance Resources International,Inc, 2003). Berdasarkan kajian

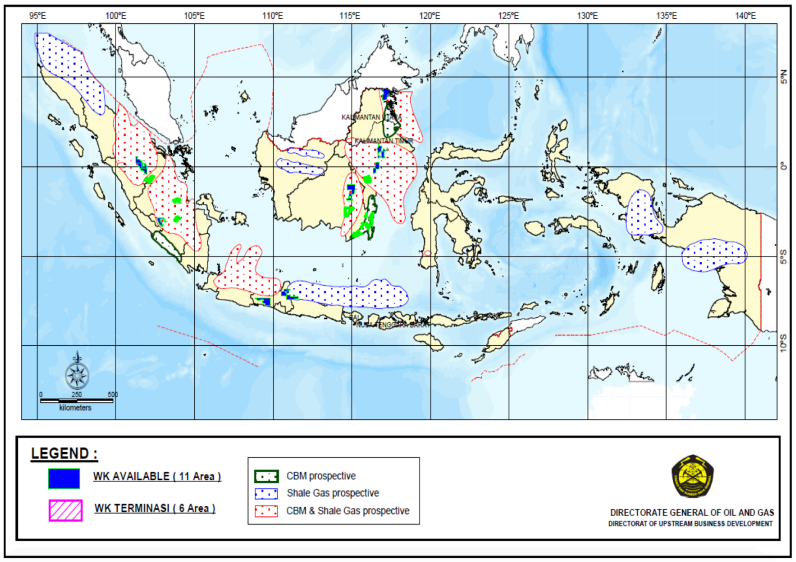

Gambar 13. Sebaran Wilayah Kerja Available dan Terminasi, serta Cekungan Gas Metana Batubara dan Shale Hydrocarbon Indonesia

hasil studi, Indonesia memiliki cadangan Gas Metana Batubara sebesar 453 TCF, dengan kedalaman lapisan antara 500 – 5000 feet. Diperkirakan jumlah Gas Metana Batubara tersebut dapat terambil adalah sebesar 200 TCF.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah, hingga saat ini terdapat 13 (tiga belas) cekungan shale gas di Indonesia. Cekungan terbesar berada di Sumatera yaitu cekungan Sumatera Tengah dan cekungan Kutai dengan masing-masing sumber daya hipotetik 86,90 TCF dan 80,59 TCF. Keseluruhan sumber daya hipotetik berdasarkan kajian Badan Geologi KESDM tahun 2010 sekitar 574 TSCF.

Potensi Shale Hydrocarbon Indonesia sangat menarik perhatian investor, dimana banyak terdapat lapangan migas proven dengan jumlah produksi yang cukup besar. Penting bagi kita untuk memulai studi potensi Shale Hydrocarbon terutama pada cekungan penghasil migas konvensional terbesar di Indonesia, seperti Cekungan Sumatera Tengah, Cekungan Sumatera Selatan, dan Cekungan Kutai. Diharapkan dari kerja sama ini, proses penyiapan wilayah kerja yang berada di wilayah terbuka semakin meningkat dan diminati.

2. Penawaran Wilayah Kerja

1. Meningkatkan promosi investasi industri hulu Migas Non Konvensional
   a. Promosi Wilayah Kerja dan investasi melalui pameran pada forum Internasional. Telah direncanakan mengikuti 1 pameran dalam negeri (IPA/APOGCE 2018) dan 3 pameran luar negeri yang terkait dengan industri hulu migas terutama migas non konvensional pada tahun 2018 yakni :
      - Moscow International Oil and Gas Exhibiton (MIOGE), Rusia, 26 - 29 Juni 2018
      - Gastech Exhibition and Conference, Spanyol, 17 - 20 September 2018
      - Developing Unconventional Gas (DUG) Midcontinent, USA, 13 - 15 November 2018

   Ketiga forum di atas merupakan ajang berskala internasional yang diikuti oleh para pelaku bisnis industri perminyakan dunia dan diyakini sangat bermanfaat dalam menjaga hubungan bisnis antar pelaku bisnis untuk membuka komunikasi di antara pelaku usaha perminyakan dunia sehingga diperoleh peluang investasi untuk menarik investor melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.
   Rencana keterlibatan dalam pameran tersebut untuk memperkenalkan kebijakan tentang pengusahaan migas non konvensional sekaligus promosi penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional di Indonesia, disamping itu juga memberikan informasi secara kontinyu perkembangan regulasi di bidang investasi sektor hulu migas sehingga diharapkan bertambahnya investasi.
   b. Penggunaan multi media dalam kegiatan promosi
   Disamping melakukan promosi dalam bentuk pameran sebagai juru penerang/ presenter dalam menjelaskan mengenai penawaran wilayah kerja migas non konvensional, peningkatan promosi juga dilakukan melalui penyediaan media cetak maupun elektronik antara lain booklet, poster, leaflet, brosur, dan CD film promosi.
2. Peningkatan layanan Penawaran Wilayah Kerja melalui Sistem Lelang Elektronik Online
   Untuk memperoleh calon investor yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan pengusahaan migas non konvensional, maka perlu dilakukan penyebaran informasi secara masif dan terbuka mengenai penawaran wilayah kerja baru yang akan ditawarkan. Untuk itu, proses penawaran wilayah kerja berikutnya akan dilakukan secara elektronik seperti halnya pada e-procurement. Informasi

Gambar 14. Alur Proses E-Lelang Blok Migas

lelang wilayah kerja dapat diakses oleh siapun dan dimanapun melalui sebuah situs. Pengambilan Dokumen Lelang berupa e-document juga dapat diunduh setelah terkonfirmasi pembayaran atas pembelian dokumen.

Diharapkan pelaksanaan lelang dengan sistem elektronik tersebut memberikan pelayanan kepada calon investor secara lebih berkualitas dan dapat meningkatkan jumlah partisipasi lelang serta dalam upaya transparansi untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

3. **Penyempurnaan Bentuk dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama**
   Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat alternatif bentuk Kontrak Bagi Hasil Migas Non Konvensional, antara lain : Kontrak Bagi Hasil PSC Standar, Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale, dan Kontrak Bagi Hasil Gross split Sliding Scale. Dan sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 yang selanjutnya ditetapkan perubahannya melalui Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 telah mencabut bentuk Kontrak Bagi Hasil Gross split Sliding Scale dan mengatur sepenuhnya tentang Bentuk Kontrak Bagi Hasil Gross split.

   Pada Bentuk Kontrak Bagi Hasil Gross split, terdapat banyak keuntungan yang diperoleh oleh Kontraktor Migas Non Konvensional terutama penambahan bagi hasil (split) pada komponen variabel Kedalaman Reservoir, Jenis Reservoir, dan Tahapan Produksi.

   Selain bentuk kontrak, juga akan dilakukan penyempurnaan tentang ketentuan pokok yang lebih memudahkan dan menguntungkan investor, antara lain : Besaran Bonus Tanda Tangan yang lebih rendah, Penyisihan Area yang lebih kecil, Minimal Komitmen Pasti yang lebih realistis, dan kemudahan dalam persyaratan Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan menarik calon Kontraktor Migas Non Konvensional.

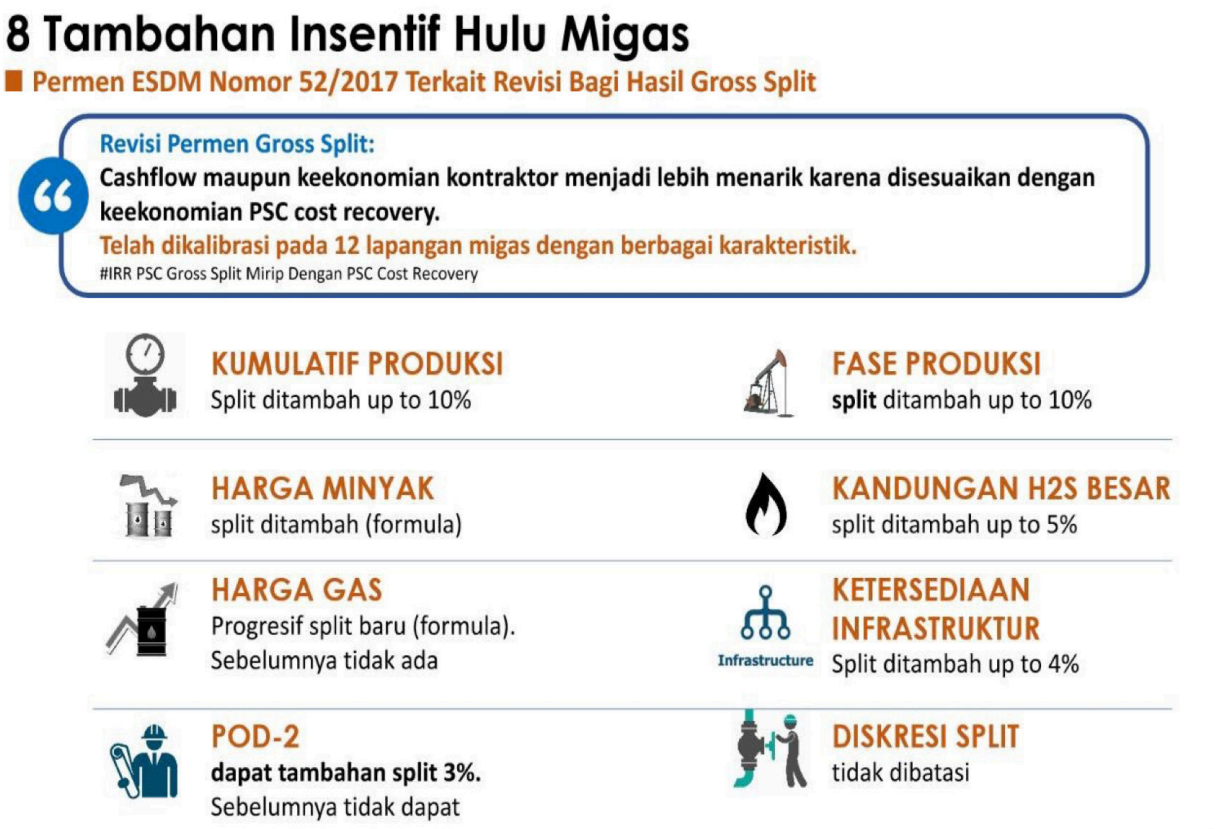

Gambar 15. Tambahan Insentif Hulu Migas

CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Target cadangan minyak dan gas bumi tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Penurunan target tersebut dengan mengasumsikan bahwa pada tahun 2018 tidak ditemukan cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan yang telah diproduksikan (Reserves Replacement Ratio (R3) < 1). Idealnya R3 ≥ 1 dimana setiap produksi 1 barel harus diimbangi dengan penemuan cadangan dari eksplorasi ≥ 1 barel. Target pencapaian cadangan minyak bumi Tahun 2018 sebesar 6.441 MMSTB sedangkan gas bumi Tahun 2018 sebesar 143 TSCF. Dalam rangka pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/ konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves);
2. Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan harapan (Possible) ke mungkin (Probable) maupun dari cadangan mungkin (Probable) ke terbukti (Proven);
3. Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun reassesment cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.

Gambar dibawah ini menunjukan status terbaru jumlah cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Evaluasi cadangan minyak bumi perlu dilakukan dalam rangka perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksikan.

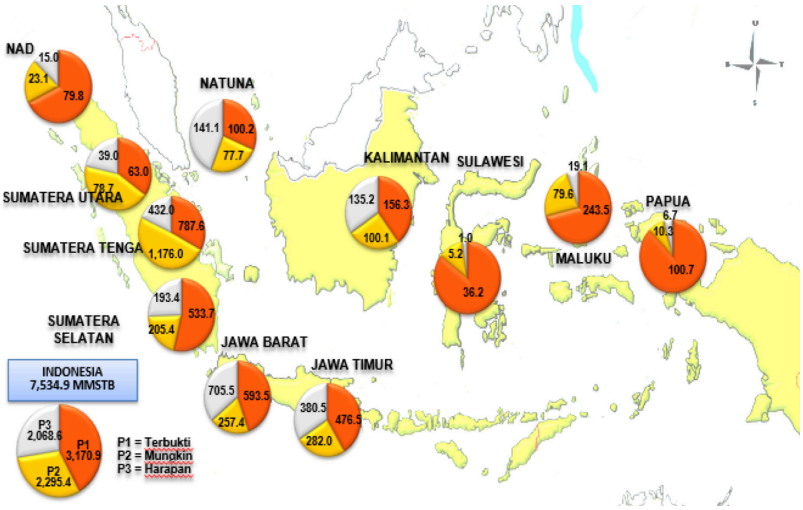

Gambar 16. Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)

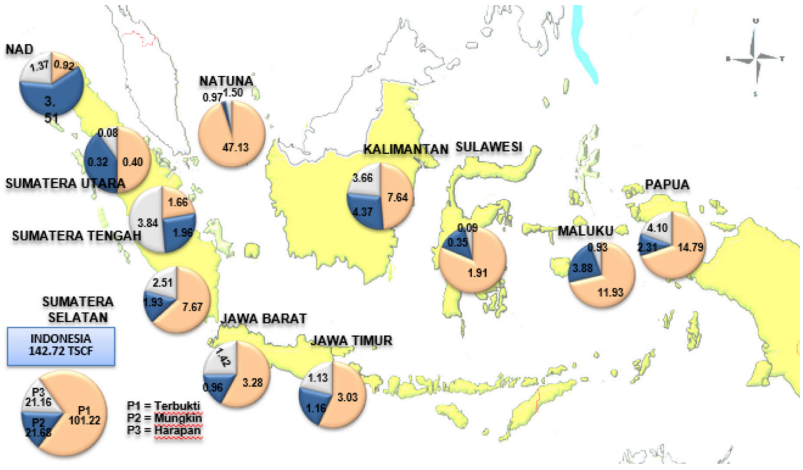

Gambar 17. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2017)

PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

Persentase Alokasi Gas Domestik

Pemanfaatan gas bumi domestik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang juga mengamanatkan dan memberi payung hukum atas perubahan paradigma dimana "energi tidak lagi berperan sebagai komoditi tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat a serta Pasal 9. Peraturan dimaksud memberi landasan Pemerintah dalam mengupayakan agar sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional dan tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan paradigma lama yang menjadikan gas bumi sebagai komoditi untuk menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah. Mengingat pentingnya pencapaian target energy mix dan target pemanfaatan sumber daya energi sebagai modal pembangunan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku instansi pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan subsektor migas, menargetkan persentase alokasi gas bumi sebesar 63% pada tahun 2018 sebagai indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
Komitmen pemerintah untuk mengalokasikan gas bumi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi domestik kian diperkuat dengan adanya beberapa peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM nomor 06 tahun 2016 diatur bahwa alokasi pemenuhan kebutuhan energi domestik dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang terdiri dari:

1. Pemanfaatan untuk program Pemerintah seperti Penyediaan Gas Bumi untuk Transportasi, Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rumah Tangga, dan Pelanggan Kecil;
2. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional;
3. Industri pupuk;
4. Industri berbasis gas bumi;
5. Penyediaan gas bumi untuk tenaga listrik;
6. Industri yang ber bahan bakar gas bumi.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

a. Fasilitasi Pembangunan FSRU

Untuk mensukseskan diversifikasi energi menggunakan gas bumi, pemerintah mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan gas bumi baik dengan pembiayaan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Sampai dengan tahun 2019 pemerintah menargetkan terbangunnya LNG receiving terminal dan liquefaction sebanyak 7 unit. Tahun 2018 pembangunan FSRU Jawa Tengah dan pada tahun 2019 akan dibangun LNG Masela dan LNG Tangguh Train 3. Dalam rangka mencapai sasaran kinerja tersebut Pemerintah berupaya:

1. Memastikan bahwa kebutuhan gas domestik terjamin;
2. Penyerapan gas oleh end-user dapat terpenuhi minimal 85%;
3. Mengevaluasi harga gas yang dapat diterima oleh produsen gas dan end-user;
4. Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi melalui Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional;
5. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur gas bumi melalui penyertaan modal negara;
6. Menetapkan peraturan yang mengatur pengusahaan gas di sektor hilir.

b. Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga

Target kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga pada tahun 2018 sebanyak 78.315 SR di 16 Kota/ Kabupaten.
Dalam rangka pencapaian target terbangunnya Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di wilayah-wilayah tersebut maka direncanakan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis meliputi :

1. Pembentukan Panitia Lelang dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Jargas di awal Tahun Anggaran berjalan agar proses pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jargas dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.
2. Melakukan Rapat Koordinasi intensif terkait pembahasan segala macam jenis perizinan pembangunan Jargas dengan instansi terkait seperti Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI), Jasa Marga dan instansi lain terkait.
3. Melakukan Koordinasi insentif dengan PEMDA terkait penggunaan fasilitas umum untuk penggelaran pipa pada jalan umum, penyediaan lahan untuk MR/S dan RS, pekerjaan penggalian dan rehabilitasi pasca penggalian.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemda yang akan menerima manfaat/dampak Pembangunan Jargas terkait pemberian pemahaman dan meredam gejolak yang kemungkinan ada di masyarakat.
5. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada kontraktor pelaksana konstruksi Jargas dan konsultan pengawas dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat terhadap setiap kemajuan proyek dan penyelesaian setiap kendala yang mungkin timbul agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat biaya.
6. Melakukan inventarisasi asset barang milik negara pada program jargas yang selanjutnya disampaikan kepada

Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk dimintakan persetujuan atas skema pengelolaan asset.

7. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terkait penunjukkan BUMN untuk mengoperasikan Jargas yang telah dibangun.
8. Melakukan koordinasi dengan Pemda, SKK Migas, BPH Migas, Pemasok Gas Bumi dan BUMN yang ditunjuk untuk mengoperasikan Jargas mengenai harga gas bumi yang akan ditetapkan Pemerintah di sisi Hulu dan Hilir.

c. Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil

Gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber energi dan bahan baku, penerimaan Negara, serta juga dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatan kapasitas nasional. Peranan Gas Bumi sebagai salah satu sumber energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan Gas Bumi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu.
Bahan bakar yang umum digunakan di Indonesia pada kapal-kapal laut adalah bahan bakar minyak. Nelayan sering mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pasokannya. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah berencana untuk menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif energi dalam bidang kelautan dengan asumsi bahan bakar gas merupakan energi yang relatif lebih bersih dan lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak.

Dalam rangka program konversi BBM ke BBG pada kapal perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan telah melaksanakan kegiatan pengujian penggunaan LPG pada Kapal Perikanan Skala Kecil (≤5 GT). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa penggunaan LPG untuk kapal perikanan terbukti mampu mengurangi konsumsi BBM, baik BBM jenis bensin maupun solar. Pada motor bensin dapat menggantikan BBM 100%, sedangkan pada motor diesel dapat menggantikan BBM sekitar 69%.

Berikut perhitungan efisiensi biaya penggunaan LPG dibandingkan dengan BBM bensin) berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Lemigas :

Pada Kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan TA.2018, rencananya akan dibagikan sebanyak 25.000 paket konversi BBM ke BBG.

PERHITUNGAN KONVERSI BAHAN BAKAR BENSIN KE LPG UNTUK NELAYAN

KONVERSI BAHAN BAKAR BENSIN KE LPG
BENSIN DAPAT DIGANTIKAN DENGAN LPG 100%

1. Asumsi: Harga Bensin Rp.6450/Liter; Harga LPG (Subsidi) **Rp.17000/3 Kg**

	Penggunaan Bensin			Penggunaan LPG			SELISIH	
Penggunaan Bahan Bakar Bensin utk Kebutuhan Melaut (Kapal Perahu Bermotor < 5 GT dengan mesin 13 HP selama 10 jam (one day fishing))	Bensin	Pengeluaran Nelayan		LPG	Pengeluaran Nelayan		Pengeluaran Nelayan	
	(Liter)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	3 kg	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)
	21	135,450	49,439,250	3	51,000	18,615,000	84,450	30,824,250

2. Asumsi: Harga Bensin Rp.6450/Liter; Harga LPG (NON-Subsidi) **Rp.34000/3 Kg**

	Penggunaan Bensin			Penggunaan LPG			SELISIH	
Penggunaan Bahan Bakar Bensin utk Kebutuhan Melaut (Kapal Perahu Bermotor < 5 GT dengan mesin 13 HP selama 10 jam (one day fishing))	Bensin	Pengeluaran Nelayan		LPG	Pengeluaran Nelayan		Pengeluaran Nelayan	
	(Liter)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	3 kg	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)	/Hari (Rp)	/Tahun (Rp)
	21	135,450	49,439,250	3	102,000	37,230,000	33,450	12,209,250

Gambar 18. Perhitungan Konversi Bahan Bakar Bensin ke LPG untuk Nelayan

d. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg

Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan program nasional yang dimulai pada tahun 2007 lalu dengan diterbitkannya landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Program konversi Mitan ke LPG dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin penyediaan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Program ini juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka mensukseskan Kebijakan Energi Nasional, yaitu melalui diversifikasi energi. Pada tahun 2018 kegiatan Konversi Minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg ini, direncanakan akan dibagikan sebanyak 544.409 paket.

VOLUME BAHAN BAKAR SUBSIDI

a. Volume BBM Bersubsidi

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001 tentang Migas). Salah satu tantangan dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi bahan bakar adalah persoalan ketepatan sasaran dan keadilan. Sejak lama bangsa Indonesia terlena dengan mitos bahwa negeri ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah misalnya minyak bumi, sehingga menjadikan masyarakat pengguna BBM terbiasa menikmati BBM dengan harga yang murah, padahal harga tersebut merupakan harga yang telah disubsidi. Namun, kondisi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat kurang mampu untuk mendapatkan harga BBM yang terjangkau. Bahkan kenyataannya masyarakat yang kurang mampu yang umumnya tinggal di pedesaan dan jauh dari SPBU membeli BBM dengan harga yang jauh diatas harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.

b. Volume LPG Bersubsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana menerapkan distribusi ſ tertutup untuk elpiji 3 kilogram (kg) agar pemberian subsidi tepat sasaran yaitu pada masyarakat tidak mampu dengan tujuan pasokan lebih terjamin untuk kalangan tersebut.Tahun 2018 Ditjen Migas menargetkan volume LPG bersubsidi sebesar 6,45 Juta MT. Besaran volume LPG bersubsidi dipengaruhi oleh besaran wilayah yang telah terkonversi serta jumlah penerima paket perdana. Salah satu langkah pengendalian volume LPG bersubsidi adalah dengan meminta badan usaha pelaksana PSO untuk memberikan kuota kepada tiap-tiap SPBE di daerah dengan menimbang pemberian kuota tersebut tidak menimbulkan efek negatif seperti kenaikan harga.

JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan negara. Minyak dan gas bumi merupakan penghasil penerimaan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 adalah meningkatnya penerimaan subsektor migas dalam pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan subsektor migas sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain:

a. Volume lifting minyak bumi;
b. Volume lifting gas bumi;
c. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP);
d. Kurs Rupiah;
e. Cost recovery;

Sesuai dengan program kerja tahun 2018 dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang sumber daya alam subsektor minyak dan gas bumi. Terdapat 3 (tiga) parameter yang mempengaruhi besar dan kecilnya penerimaan negara SDA migas, yaitu antara lain adalah:

1. Lifting/Produksi minyak dan gas bumi
   Untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang subsektor minyak dan gas bumi, tentunya produksi/ lifting minyak dan gas bumi harus ditingkatkan. Berbagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara

lain optimalisasi produksi minyak dengan menggunakan metode Enhanced Oil Recovery (EOR), melakukan upaya-upaya preventive/predictive maintenance untuk mengurangi unplanned shutdown, efisiensi operasi dan optimasi fasilitas produksi perlu dilakukan agar target lifting dan penerimaan negara dapat dicapai dengan baik.

2. Harga Minyak Mentah
   Harga minyak mentah memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara, baik penerimaan SDA migas dan PPh migas, maupun PNBP lainnya yang berasal dari pendapatan minyak mentah DMO (Domestic Market Obligation). Meningkatnya harga minyak mentah akan mengakibatkan kenaikan pendapatan/penerimaan negara dari production sharing contract migas melalui PNBP (*dengan syarat kondisi: jika harga jual minyak mentah DMO lebih besar dibandingkan harga beli pemerintah atau harga minyak mentah DMO milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibeli oleh pemerintah).
3. Nilai Tukar Rupiah
   Nilai tukar rupiah terkait erat dengan asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, salah satunya seperti penerimaan serta impor SDA migas.
4. Cost Recovery
   Sistem kontrak antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah PSC (Production Sharing Contract) dimana dalam skema PSC terdapat Cost recovery atau biaya produksi yang dikembalikan kepada kontraktor sesuai PP 79 tahun 2010.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya asumsi/parameter dalam RAPBN 2018 maka target penerimaan negara dari SDA migas sebesar Rp 118,95 Triliun, dengan rincian asumsi/ parameter berikut:

1. Lifting minyak bumi sebesar 800 MBOPD
2. Lifting gas bumi sebesar 1.200 MBOEPD
3. Harga ICP sebesar 48 US$/Barrel

Upaya-upaya strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam migas tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi/lifting migas
2. Harga Minyak Mentah Indonesia
   - Melakukan evaluasi kinerja Formula Harga Minyak Mentah Utama Indonesia
   - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan harga minyak mentah Indonesia setiap bulan
   - Melakukan evaluasi formula harga minyak mentah Indonesia lainnya dengan memperhatikan kontinuitas produksi, kestabilan kualitas, ketersediaan infratruktur dan/ atau kestabilan pasar atas suatu jenis minyak mentah.
3. Harga Gas Bumi
   Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melakukan renegoisasi harga gas bumi untuk konsumen dalam negeri dalam rangka mendukung peningkatan keekonomian lapangan dan kontribusi produksi gas bumi.

INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Kenaikan/penurunan nilai investasi migas disebabkan dari berbagai faktor antara lain kondisi investasi hulu dan hilir migas. Jika dilihat pada tahun 2010 -2014, terjadi kenaikan harga minyak dunia kemudian dilanjutkan sepanjang tahun 2015 terjadi penurunan signifikan harga minyak mentah sampai akhirnya menyentuh level terendah sebesar 27 US$/barrel di Januari 2016. Nilai investasi migas dipengaruh oleh kondisi supply dan demand pasar di mana akan berpengaruh terhadap harga minyak mentah. Diproyeksikan akan ada kenaikan harga minyak dalam tahun-tahun ke depan karena mulai terlihat adanya rebound harga minyak.

Pada tahun 2018 diperkirakan investasi migas sebesar 15,420 Miliar USD nilai ini berasal dari investasi hulu sebesar 14,44 Miliar USD dan investasi hilir sebesar 0,25 Miliar USD.
Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan investasi migas antara lain Pelaksanaan promosi investasi migas di beberapa negara, perlindungan para investor yang telah berinvestasi di dalam negeri dengan cara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan perizinan migas. Sebanyak 42 jenis perizinan telah dipindahkan ke BKPM dan kajian perizinan lainnya agar dapat disederhanakan atau digabungkan.

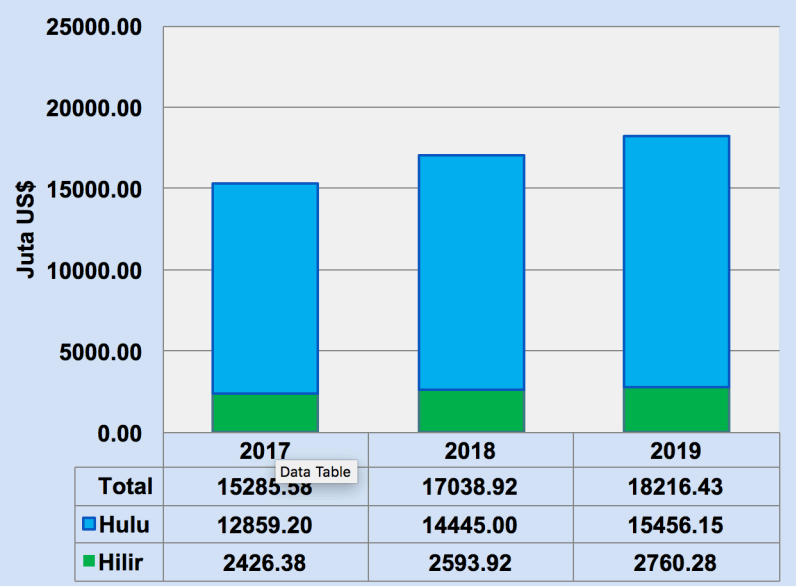

	2017	2018	2019
Total	15285.56	17038.92	18216.43
Hulu	12859.20	14445.00	15456.15
Hilir	2426.38	2593.92	2760.28

Grafik 17. Investasi di Subsektor Migas

JUMLAH PERUSAHAAN MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN KERJA (ZERO ACCIDENT) DAN KEGAGALAN OPERASI (UNPLANNED SHUTDOWN) FATAL

a. Hulu

Dalam rangka memenuhi target kinerja zero accident (tidak ada fatality dan kecelakaan berat) pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2018, maka Ditjen Migas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Ditjen Minyak dan Gas bumi c.q Subdit Keselamatan Hulu Migas menargetkan adanya 200 BU/BUT pada operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahun 2018 yang tidak terjadi kecelakaan kerja berat dan fatal serta unplanned shutdown.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidentil ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
3. Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada BU.

5. Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para stakeholder migas.

b. Hilir

Kegiatan hilir migas terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas. Kegiatan migas merupakan kegiatan yang sangat terkait erat dengan kelangsungan perekonomian suatu daerah, kota ataupun Negara. Karena itu maka diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha migas. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha migas maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap lingkungan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha (BU) pada kegiatan usaha migas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu melalui:

a. Kegiatan pemeriksaan teknis dan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi dan instrumentasi;
b. Pembinaan dan pengawasan teknis alat ukur migas;
c. Penyusunan pedoman (Keselamatan hilir migas);
d. Pengawasan sistem manajemen pengamanan kegiatan usaha migas;
e. Pembentukan dan membantu pelaksanaan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM); dan
f. Pembinaan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas.

Sektor Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang padat modal, teknologi tinggi, resiko tinggi, serta sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi tertentu, sehingga diperlukan kaidah keteknikan yang sangat baik untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan keselamatan Migas. Di samping itu kegiatan usaha minyak dan gas bumi berperan penting sebagai sumber penerimaan negara, penyedia energi (bahan bakar minyak (BBM), listrik, Bahan Bakar Nabati), menarik investasi, penyedia bahan baku industri. Permasalahan yang muncul yaitu semakin meningkatnya pemanfaatan minyak dan gas bumi maka semakin banyak penggunaan sistem alat ukur dalam menunjang operasi serah terima (custody transfer) antara para pihak yang terlibat dalam rantai pemanfaatan minyak dan gas bumi mulai dari kegiatan hulu, kegiatan hilir dan pengguna akhir minyak dan gas bumi.

Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 40 mengamanatkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi dan mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap BU/ BUT adalah mewujudkan kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang aman, selamat, handal, dan akurat.
Mengingat kompleksnya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, diperlukan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan sehingga peralatan, instalasi dan instrumentasi yang dipergunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dioperasikan dengan baik dan dijamin kehandalannya Selain dari hal tersebut di atas, dalam rangka mengambil langkah-langkah segera dan sistematis untuk pengedalian potensi bahaya dan penanganan kecelakaan yang menyangkut keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi maka dibentuklah Tim Independen Pengendalian Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan pemeriksaan audit diperlukan suatu pedoman audit Sistem Manajemen Keselamatan Lingkungan. Tujuan dari perumusan pedoman ini adalah tercapainya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang aman, selamat, dan handal. Indikator dari kegiatan ini adalah Kontraktor atau Badan Usaha yang memiliki SMKM dengan Rating dengan Nilai di atas 80. Pelaksanaan pembinaan terhadap stakeholder yang melakukan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi juga dilakukan mengingat pentingnya kegiatan migas bagi kesejahteraan rakyat, dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut jika tidak dilakukan dengan kaidah keteknikan yang baik. Sehingga tahun 2018 menargetkan jumlah perusahaan migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned Shutdown) fatal sebanyak 200 perusahaan.

BAB 4

ANGGARAN DITJEN MIGAS

Dalam rangka pencapaian bertujuan negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pendekatan pengelolaan anggaran yang saat ini berlaku adalah pengelolaan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget) yang berfokus pada sasaran, outcomes, dan output sehingga dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi kegiatan. Lebih rinci lagi pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini akan memberikan informasi kinerja atas program/ kegiatan pada suatu K/L serta dampaknya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan tetapi keterkaitan hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up).

Saat ini Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja rutin dan infrastruktur dengan total pagu tiap tahun sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

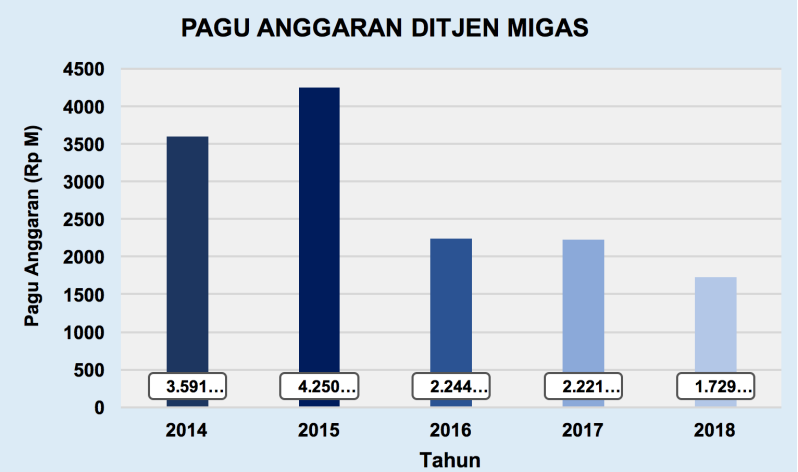

Grafik 18. Pagu Anggaran Ditjen Migas Periode 2014-2018

Untuk realisasi anggaran tiap tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

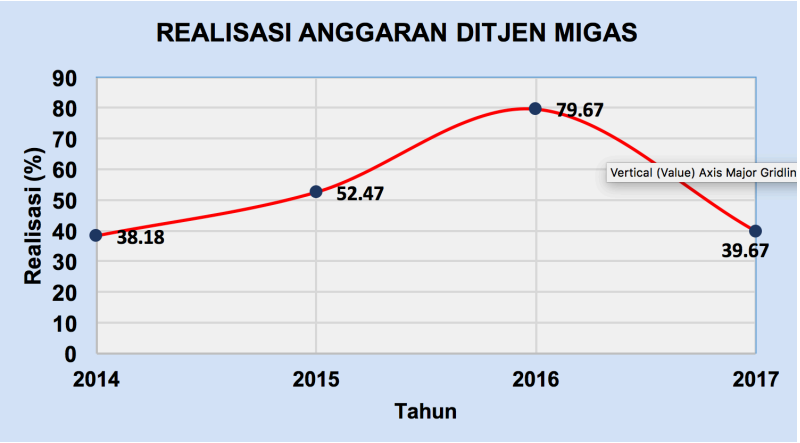

Grafik 19. Realisasi Anggaran Ditjen Migas

Sampai dengan 10 November 2017 realisasi diproyeksikan sampai dengan akhir Desember dapat mencapai 65,30% dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.221.500.000.000. Tahun 2018 alokasi anggaran Ditjen Migas sebesar Rp 1.729.967.194.000 atau 26.63 % dari Anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp. 6.497.090.000.000.

Proses penyusunan anggaran di lingkungan Kementerian ESDM dimulai bulan Januari sampai ditetapkannya pagu definitif di bulan Oktober dan penetapan DIPA TA 2018 di bulan Desember 2017.

Alokasi anggaran Ditjen Migas secara umum di bagi menjadi dua yaitu belanja regular dan belanja infrastruktur. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk Tahun Anggaran 2018 porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk belanja infrastruktur sebesar Rp 1.471,05 M atau 85,03 % dari total anggaran yang ada.

Secara rinci belanja infrastruktur terdiri dari 6 kegiatan sebagaimana terlihat dalam table berikut:

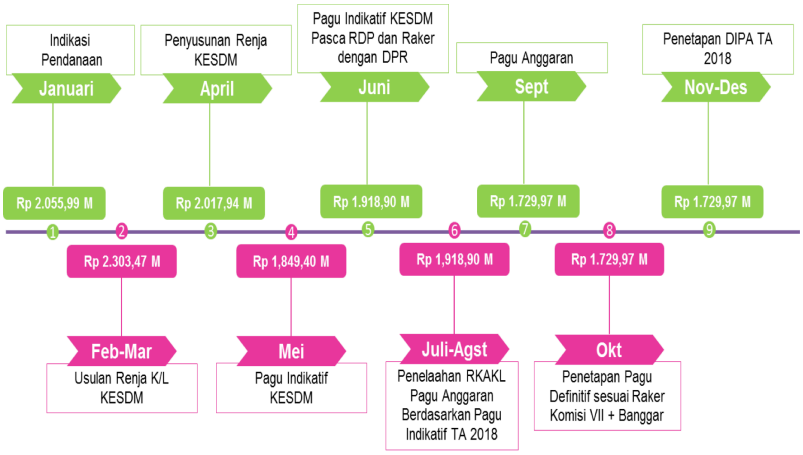

Gambar 19. Proses Penyusunan Anggaran di Kementerian ESDM

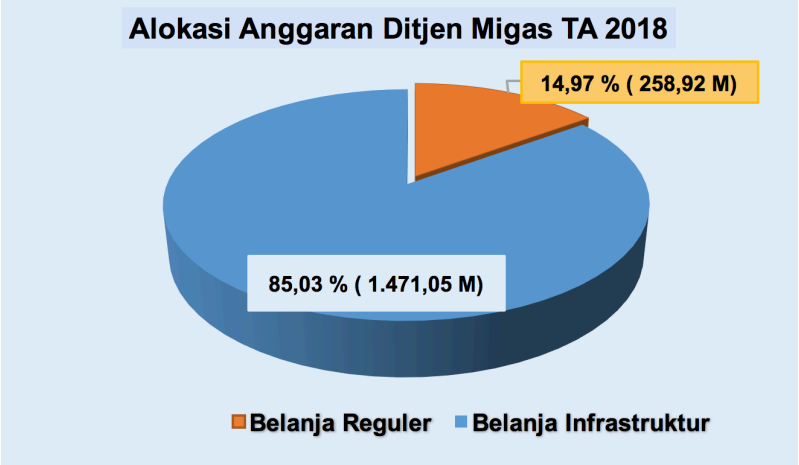

Grafik 20. Alokasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2018

NO	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS	PAGU (RP)
1	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	822.905.620.000,00
2	Pembangunan Pipa Transmisi Jargas	133.000.000.000,00
3	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	300.961.781.000,00
4	Konversi MITAN ke LPG Tabung 3 Kg	177.897.684.000,00
5	Penyusunan FEED –DEDC dan UKL-UPL Jargas	36.283.176.000,00
	Total	1.471.048.261.000,00

Tabel 13. Porsi Belanja Infrastruktur Migas

Sedangkan untuk belanja regular, teralokasi ke 6 unit eselon II sebagai berikut:

NO	KEGIATAN REGULER	PAGU (RP)
1	Direktorat Pembinaan Program	17.248.058.000,00
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	36.785.180.000,00
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	16.661.858.000,00
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan	15.464.693.000,00
5	Sekretariat Ditjen Migas	154.431.405.000,00
6	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	18.327.739.000,00
	Total	258.918.933.000,00

Tabel 14. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

02854

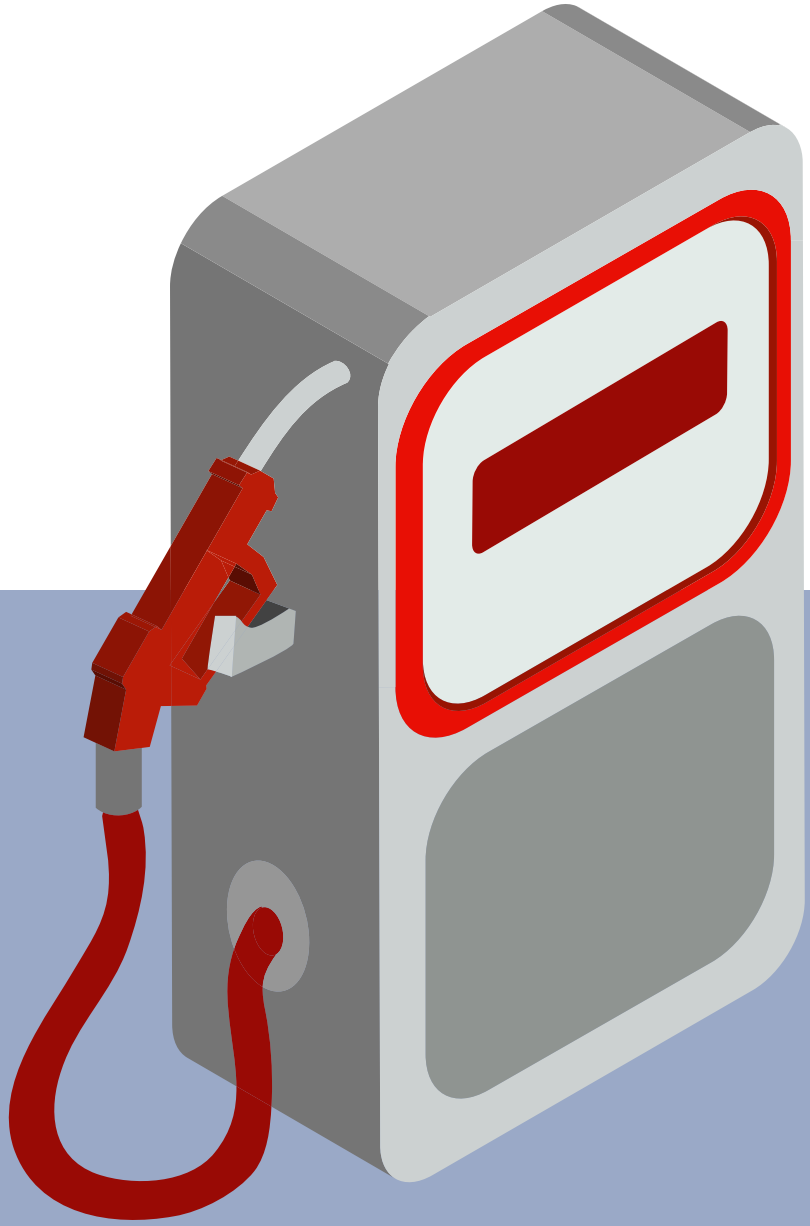

BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Pencapaian misi/sasaran K/L (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam K/L, dan Pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output). Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian output/ kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

IKK DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Barang Operasi Migas		2.800.000,00
	Evaluasi Pengajuan Dokumen IMTA dan RPTKA	1	
	Evaluasi Pengajuan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Impor Terkait Penggunaan Barang Dalam Negeri	1	
2	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas		5.197.970,00
	Jumlah Penetapan Formula dan Harga Minyak Indonesia	12	
	Jumlah Pengawasan implementasi program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat	3	
	Optimalisasi Penerimaan Negara	205	
	Pengawasan dan Optimalisasi Lifting dan Penerimaan Migas	1	
3	Terlaksananya Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi		3.000.000,00
	Jumlah kerja sama dalam dan luar negeri	22	
	Evaluasi Pemanfaatan Kerjasama Minyak dan Gas Bumi	2	
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Investasi Migas		2.850.087,00
	Presentase Penggunaan produksi dalam negeri P3DN pada kegiatan investasi migas	63	
	Fasilitasi investasi subsektor migas	22306	
	Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Produk dalam Negeri	1	
	Pengawasan dan Pembinaan Investasi Minyak dan Gas Bumi	1	
5	Terfasilitasinya Perencanaan Strategis dalam Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi		3.400.000,00
	Fasilitas Pengaturan dan Koordinasi Harga Gas Bumi	1	
	Rekomendasi Revisi Rencana Strategis Ditjen Migas	1	
	Fasilitasi Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	63	
	Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	1	
	Total		17.248.057,00

Tabel 15. IKK Direktorat Pembinaan Program

IKK DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR

DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terfasilitasinya Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi		3.080.489,00
	Izin usaha pengangkutan minyak bumi, BBM, dan hasil olahan	40	
	Jumlah penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengangkutan Dalam Negeri Minyak Bumi, BBM, dan hasil olahan yang terfasilitasi	10000	
2	Terfasilitasinya Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi		3.942.625,00
	Jumlah surat Rekomendasi Ekspor dan Impor Migas	48	
	Jumlah Izin Usaha Niaga Minyak Bumi, BBM, LPG, LNG, BBG/CNG, Gas Bumi Melalui Pipa serta hasil olahan	19	
	Volume Penjualan bahan bakar Minyak Dalam Negeri	78,75	
	Sosialisasi tata niaga migas	1	
	Jumlah Surat Keterangan Penyalur BBM dan LPG	19	
3	Terfasilitasinya Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi		2.753.751,00
	Izin usaha penyimpanan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan migas	3	
	Jumlah penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur penyimpanan minyak bumi dan BBM dalam negeri yang terfasilitasi	20	
4	Terfasilitasinya Kegiatan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahan		7.288.705,00
	Jumlah penyediaan kapasitas terpasang kilang minyak yang terfasilitasi	1,17	
	Rekomendasi impor pelumas untuk penggunaan sendiri	700	
	Jumlah penyediaan kapasitas terpasang kilang LPG yang terfasilitasi	4,66	
5	Terlaksananya Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar		18.698.094,00
	Volume BBM Bersubsidi	17,03	
	Rekomendasi harga bahan bakar (BBM, LPG, CNG)	5	
	Volume LPG Bersubsidi	7,89	
6	Terfasilitasinya Dukungan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi		810.655,00
	Jumlah Layanan Internal	1	
	Total		36.574.319,00

Tabel 16. IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hilir

IKK DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU

DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terlaksananya Penawaran kontrak kerja sama migas dan penetapan Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional		3.485.740,00
	Jumlah penawaran WK Migas Konvensional (Wilayah Kerja)	8	
	Jumlah pelaksana Kegiatan Eksplorasi dan Ekploitasi	6	
2	Terlaksananya Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan Penetapan Pemenang Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional		3.456.980,00
	Jumlah pelaksana Kegiatan Eksplorasi dan Ekploitasi	2	
	Jumlah Penawaran Jumlah penawaran WK Migas Non Konvensional	4	
3	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi		3.100.008,00
	Jumlah survei Seismik 3 D yang terfasiltasi	2726	
	Jumlah pemboran eksplorasi yang terfasiltasi	49	
	Jumlah sumber daya migas konvensional dan nonkonvensional	90,07	
	Jumlah survei Seismik 2 D yang terfasiltasi	3852	
4	Terlaksananya Evaluasi Penyerahan Data Hasil Kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi dan Survei Umum		3.295.975,00
	Jumlah Persetujuan Plan of Development	1	
	Jumlah Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lainnya	2	
	Jumlah Persetujuan Amandemen dan/atau Perpanjangan Kontrak	2	
5	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi		3.323.155,00
	Jumlah Cadangan Minyak Bumi	6.441	
	Jumlah Cadangan Gas Bumi	143	
	Jumlah Produksi/ lifting migas	2.015	
	Total		16.661.858,00

Tabel 17. IKK Direktorat Pembinaan Usaha Hulu

IKK DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terlaksananya Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi		2.831.734,00
	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	50	
	Jumlah pemanfaatan gas flare	15	
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Usaha Penunjang dan Perusahaan jasa inspeksi teknis PJIT Minyak dan Gas Bumi		1.865.783,00
	Jumlah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidangnya	30	
	Jumlah perusahaan usaha penunjang migas yang memiliki kualifikasi sesua bidangnya	375	
	Pelayanan publik yang transparan dengan sistem online	1	
3	Terlaksananya Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas		6698525
	Badan Usaha yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai diatas 90	9	
	Jumlah perusahaan hilir yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja dan kegagalan operasi (unplanned shutdown)	200	
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas		2468649
	umlah perusahaan hulu yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned shutdown)	100	
	Kontraktor yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai diatas 90	9	
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Standardisasi Migas		1600000
	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-3) untuk kegiatan usaha migas	6	
	Jumlah Rancangan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dan/atau Rancangan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) untuk kegiatan usaha migas	6	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standardisasi di kegiatan usaha migas	35	
	Total		15.464.691,00

Tabel 18. IKK Direktorat Teknik dan Lingkungan

IKK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terlaksananya Dukungan Manajemen Eselon I		154.642.269,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	
	Jumlah Laporan Kinerja	1	
	Jumlah Pemeliharaan dan Pengelolaan Website, Jaringan dan Database serta penyebaran dan pelayanan informasi publik	1	
	Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	100	
	Jumlah Rancangan Peraturan PerUUan Sektor Migas sesuai prolegnas	15	
	Jumlah Layanan Pembinaan Kepegawaian	1	
	Total		154.642.269,00

Tabel 19. IKK Sekretariat Direktorat Jenderal

IKK DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI			
NO	**SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**	**TARGET 2018**	**ALOKASI 2018 (RP RIBU)**
1	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga		827.454.680,00
	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	77880	
2	Terbangunnya Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi		0
	Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi	0	
3	Terlaksananya Pembagian Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan		307.085.858,00
	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	40000	
4	Terlaksananya Pembagian Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan		1.481.523,00
	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan	1	
5	Tersedianya Dokumen FS/FEED/DEDC/UKL-UPL Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga		36.283.176,00
	Dokumen FEED-DEDC dan UKL-UPL Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	23	
6	Terlaksananya Konversi Minyak Tanah ke Tabung LPG 3 Kg		180.369.141,00
	Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	581012	
7	Terbangunnya Pipa Transmisi Jaringan Gas		135.011.431,00
	Pipa Transmisi Jaringan Gas	42	
8	Terbangunnya Tangki Penyimpanan BBM		414.191,00
	Tanki Penyimpanan BBM	1	
9	Terlaksananya Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas		1.276.000,00
	Total		1.489.376.000,00

Tabel 20. IKK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910

Telepon : 021-5268910
Fax : 021-5205469
Email : info@migas.esdm.go.id
Website : http://migas.esdm.go.id/